

#BERSIHKAN
INDONESIA

BARU SETAHUN
SUDAH REPRESIF-
OTORITER?



BARU SETAHUN SUDAH REPRESIF- OTORITER?

#BERSIHKAN
INDONESIA



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK



Baru Setahun Sudah Represif-Otoriter?

#BersihkanIndonesia
2025

Ukuran Buku : 20 x28 cm
Halaman : iv + 74

Penanggung Jawab:
Ahmad Ashov Birry

Editor:
Dini Pramita, Zakki Amali, Alfa Arifia Setiawan, dan Habiburrachman

Penulis:
Alfa Arifia Setiawan, Ariyansah NK, Asri Widayati, Bhima Yudhistira,
Dini Pramita, Gita Ayu Atikah, Habiburrachman, Rizaldi Ageng
Wicaksono, Rofi Jaelani, Viky Arthiando, Yassar Aulia, dan Zakki Amali

Desain sampul dan tata letak:
Taqi

Diterbitkan secara kolaboratif oleh #BersihkanIndonesia pada Oktober 2025, dan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Trend Asia, Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Sajogyo Institute, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

Daftar Isi	3
Pendahuluan	5
Panduan Risalah	7
Linimasa Setahun Rezim Prabowo	9
Kebijakan Prabowo Menguntungkan Keluarga, Kader & Relawan Partai, dan TNI	9
Situasi Ekonomi	21
Rapuhnya Ekonomi	21
Serampangan Mengelola Anggaran	26
Danantara: Instrumen Politik-Ekonomi Rezim	28
Aktor dan Operator Danantara: Kotor Sejak Dari Awal	34
Risiko Korupsi dan Patronase Politik di BUMN yang Tergabung di Danantara	37
Situasi Politik Kabinet: Pembagian Kue Kekuasaan dan Ekonomi	43
Jejak Balas Budi dan Ekstraktivisme Pembantu Presiden	43
Susunan Kabinet Pasca-pelantikan	50
Reshuffle demi Reshuffle yang Memperkuat Ambisi Ekstraktif Rezim Prabowo-Gibran	51
BUMN sebagai Ruang Politik Kekuasaan	54
Peta Kuasa: Komisaris Rasa Politikus	56
Sektor Strategis dan Risiko Konflik Kepentingan	57
Situasi Demokrasi dan Kebebasan Sipil	61
Rezim Kekerasan dan Kriminalisasi	61
Eskalasi Kekerasan dan Kriminalisasi	65
Situasi Politik: Kamufase Militer Berbaju Sipil	69
Militer Sebagai Mesin Birokrasi Politik	69
Rezim Otoriter: Antara Politik Komando dan Ekonomi Komando	76
Kesimpulan	77
Apa pelajaran dari setahun rezim Prabowo-Gibran?	77



Setahun lalu, tepatnya 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanya dilantik setelah memenangi kontes pencarian pemimpin Indonesia dengan melakukan berbagai praktik lancung, seperti politik gentong babi.¹

Pelantikan itu menandai dua hal sekaligus, yaitu suksesi dinasti politik di level kepresidenan dan kembalinya 'Keluarga Cendana' ke gelanggang kekuasaan.² Prabowo sebagai presiden -- mantan menantu Keluarga Cendana -- merupakan sosok yang sangat lekat dengan militer dan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat 1998.

Sebelum pemilihan umum, Ian Wilson memperkirakan kepemimpinan Prabowo akan bergaya otoritarian. Ian juga memprediksi Prabowo akan meluaskan pendekatan "tanpa oposisi" dengan menihilkan lawan di parlemen.³ Dalam praktiknya, bukan hanya meniadakan oposisi di parlemen, rezim ini membawa demokrasi Indonesia ke titik nol melalui penguatan supremasi militer dan pelemahan supremasi sipil.⁴

Bahkan, rezim Prabowo menjadi tonggak baru kelahiran totalitarianisme -- bentuk ekstrem dari otoritarianisme di mana negara memiliki kekuasaan absolut dan mutlak dalam segala aspek kehidupan serta meniadakan ruang bagi oposisi, kritik, dan kebebasan individu.⁵ Gejala totalitarianisme ini terbaca dari gaya politik-ekonomi komando yang diterapkan Prabowo selama setahun terakhir, ketika negara mengontrol penuh seluruh alokasi sumber daya strategis dan memusatkan keputusan ekonomi pada tangan birokrasi militeristik.

Gelagat ini terbaca dari sentralisasi kekuasaan melalui pembentukan Danantara dan Badan Gizi Nasional, yang di dalamnya diisi oleh para loyalis berlatar belakang militer. Dengan kata lain, Prabowo menjadikan gaya politik-ekonomi komando sebagai instrumen politik totalitarian yang ia kendalikan.

Dari titik ini, rezim Prabowo perlahan nampak bergeser menuju fasisme, ketika kontrol politik-ekonomi berubah menjadi proyek ideologis untuk menegaskan kekuasaan tunggal yang berbalut retorika nasionalisme.⁶ Di balik jargon kemandirian dan stabilitas, negara berubah menjadi mesin kekuasaan tunggal yang menundukkan ekonomi, politik, dan wacana publik di bawah kendali ideologis sang pemimpin.

¹ Silahkan tonton Film Dokumenter Dirty Vote untuk menyaksikan politik gentong babi yang mengangkut Prabowo ke tampuk kekuasaan. Akses: <https://www.youtube.com/watch?v=RRqLZ66NCmE>

² Yoes C Kenawas, (2024, 21 Oktober), "It takes two to tango: Why dynastic politics is on the rise in Indonesia," [Indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au](https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au).

³ Ian Wilson, (2024, 30 Januari), "An Election to End All Elections?" [Fulcrum.sg](https://fulcrum.sg). Diakses 15 Oktober 2025.

⁴ Redaksi Tempo, (2025, 2 Februari), "Otoritarianisme di Depan Pintu". [Tempo.co](https://tempo.co). Diakses 17 Oktober 2025.

⁵ Friedrich, Carl J., & Brzezinski, Zbigniew K. *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956.

⁶ Paxton, R. O. (2004). *The Anatomy of Fascism*. New York: Alfred A. Knopf.

Ini terlihat dari birokrasi yang dijalankan dengan disiplin militer, kebijakan ekonomi diarahkan untuk memperkuat legitimasi negara, sementara warga digiring menjadi massa patuh yang diminta setia tanpa boleh memberikan kritik. Sehingga, baru setahun, kekuasaan Prabowo sudah represif dan otoriter. Dan perlahan namun pasti, demokrasi mati dan reformasi berakhir.

Proses ini tak ujug-ujug datang. Pemerintahan Joko Widodo selama satu dekade memberikan karpet merah bagi kelahiran totalitarianisme ala Prabowo melalui warisan UU Cipta Kerja yang mempertebal kekuasaan pemerintahan pusat dalam pengelolaan sumber daya, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta perluasan peran militer dalam berbagai pengelolaan sumber daya termasuk dalam pengelolaan proyek strategis nasional. Pemerintahan Jokowi, secara terang-terangan, sudah menunjukkan gejala pemerintahan ala otokratik meski belum berlaku utuh.⁷

Selain itu, Jokowi juga mewariskan mega-utang infrastruktur yang melemahkan kapasitas fiskal negara. Dalam menghadapi pergeseran geopolitik global akibat ekspansi kapital China dan transisi energi, rezim Jokowi cenderung permisif sehingga mengakibatkan Indonesia hanya dipandang sebagai negara tujuan investasi -- alias utang -- untuk dibongkar sumber dayanya besar-besaran.

Transisi energi secara global yang cenderung dimaknai sebagai transisi mineral kritis mendorong perburuan mineral kritis seperti nikel, bauksit, dan timah yang memperkuat jejaring oligark yang sangat bergantung pada negara sebagai regulator dan penyedia aparatus kekerasan. Berbagai kebijakan di era Jokowi membuka jalan lebar bagi pertumbuhan ekonomi ekstraktif, terutama sektor tambang.

Di atas fondasi krisis ini, Prabowo mengakselerasi warisan otokratik Jokowi. Dalam satu tahun, dampaknya nyata: 80 orang dikriminalisasi karena melawan industri tambang; 85 peristiwa kekerasan oleh TNI dengan 182 korban; 23 orang dikriminalisasi pasca demonstrasi Hari Buruh; dan 5.444 orang ditangkap, 997 di antaranya jadi tersangka pasca demonstrasi Agustus 2025.

Rezim ini membiarkan warga menanggung beban paling berat dari krisis ekonomi, sementara kekuasaan digunakan untuk menyelamatkan oligark yang dijaga penuh oleh aparatus kekerasan.



⁷ Mietzner, M. (2024). The limits of autocratisation in Indonesia: power dispersal and elite competition in a compromised democracy. *Third World Quarterly*, 46(2), 153–169. <https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2317970>

Risalah yang terdiri dari empat menu ini, terbit untuk merespons setahun rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bab Pendahuluan secara ringkas mengantarkan pembaca memahami kelindan kepemimpinan totalitarian ala Prabowo dengan gaya politik-ekonomi komando yang ia jalankan.

Bab kedua yaitu 'Linimasa Setahun Rezim Prabowo', disajikan dalam bentuk tabel kebijakan semata agar pembaca lebih mudah memahami agenda politik-ekonomi komando rezim Prabowo yang melayani bisnis pribadi dan para oligark ekstraktif di sekelilingnya.

Bab ketiga dalam payung, 'Situasi Ekonomi, Politik, dan Demokrasi', secara berturut-turut menyajikan gambaran situasi ekonomi yang menunjukkan regresi. Bagian ini juga memaparkan pemusatan kekuatan ekonomi di tangan kekuasaan presiden, menggunakan jargon nasionalisme yang bersifat memaksa, serta menebalkan kehadiran militer sebagai alat pengontrol.

Dalam bab ini dipaparkan pula kecenderungan rezim yang anti-demokrasi, baik dalam penyusunan berbagai produk regulasi, penebalan diskresi presiden, hingga pemberangusan demokrasi dengan berbagai kriminalisasi terhadap upaya perjuangan warga mempertahankan ruang hidup dan membungkam para demonstran. Paparan ini menunjukkan gejala rezim Prabowo menjalankan kekuasaan tunggal yang absolut dengan ideologi nasionalisme ekstrem dan militerisme.

Seluruh pembahasan pada bab ini dirangkai dengan benang merah politik-ekonomi komando yang dipertegas di akhir bab melalui perluasan kehadiran militer di ruang-ruang sipil. Tak hanya menempatkan militer sebagai pelaksana kebijakan, Prabowo mendudukkan militer seolah-olah sebagai pengorganisasi di ranah ekonomi dengan ia sebagai orkestratornya.

Bab empat yang menjadi, 'Kesimpulan', menutup risalah dengan menatap dinamika ekonomi, politik, demokrasi, dan kebebasan sipil di Tanah Air, berkaca dari situasi saat ini. Meski menggambarkan ketergantungan pada ekonomi ekstraktif yang menghancurkan pertanian subsistensi dan memperdalam kemiskinan struktural, terutama di pedesaan dan kota, risalah ini tidak bertujuan membuat publik pesimis.

Kondisi ini sudah selayaknya ditempatkan sebagai fondasi perlawanan yang meluas, baik terorganisir maupun spontan. Konflik agraria dan kriminalisasi terhadap petani, masyarakat adat, dan aktivis adalah bukti nyata bahwa warga menolak penindasan dan perampasan tanahnya. Penggunaan hukum dan aparat militer oleh rezim harus dibaca sebagai upaya untuk merespons perlawanan yang semakin kuat.

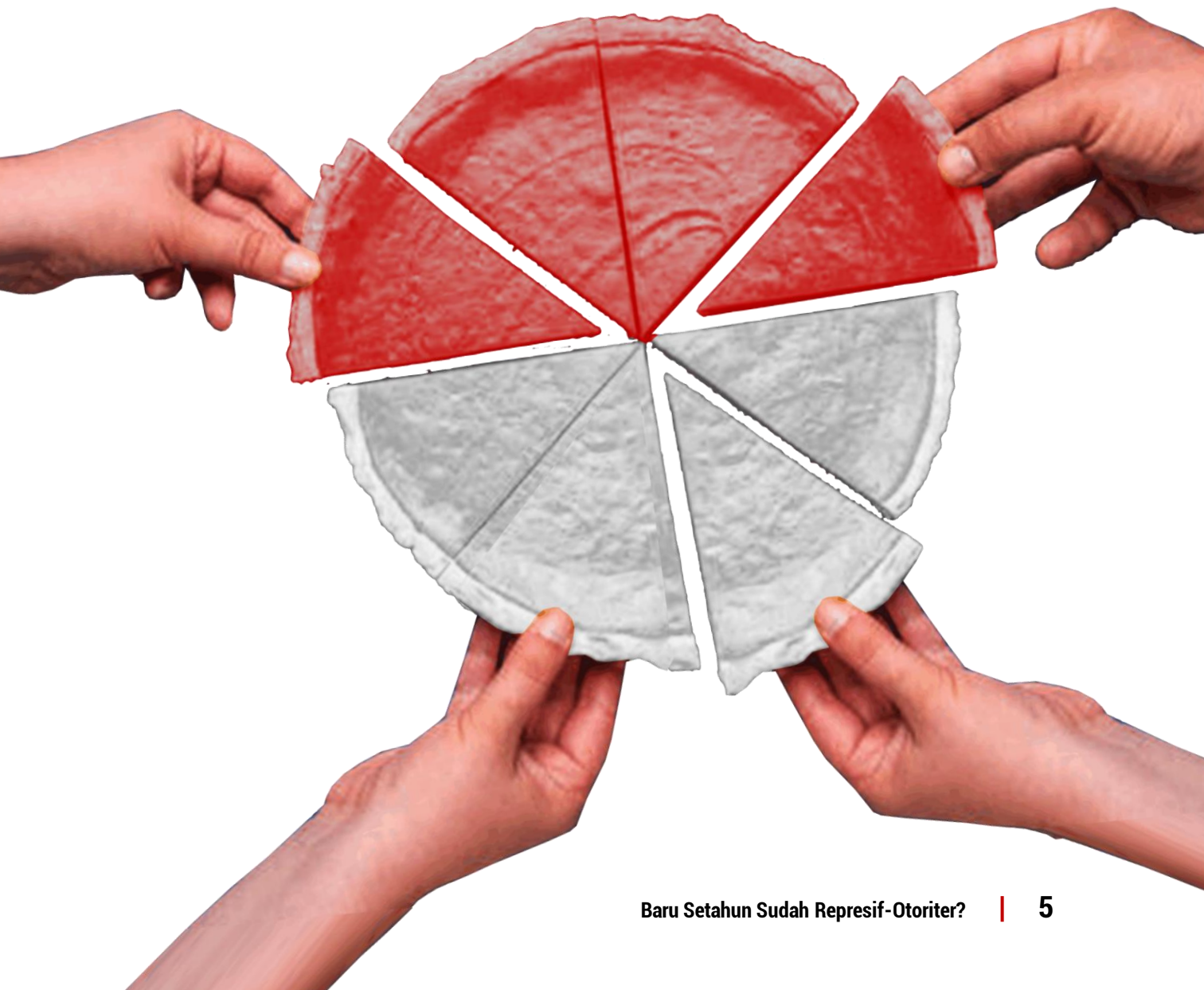
Risalah ini jauh dari kata sempurna, namun diharapkan dapat menjadi petunjuk awal untuk memahami realitas yang sedang berlangsung, dan bagaimana kekuatan gerakan sosial-politik harus meresponnya. Seperti kata Agam Wispi, "*Tanah dan darah memutar sejarah [...] yang berkuasa tapi membunuh rakyatnya mesti turun tahta.*"



Linimasa Setahun Rezim Prabowo

Kebijakan Prabowo Menguntungkan Keluarga, Kader & Relawan Partai, dan TNI

Bagian ini menyoroti linimasa produk kebijakan dalam setahun terakhir. Dari sejak awal pemerintahan, rezim Prabowo–Gibran menerbitkan belasan regulasi untuk membagi kekuasaan kepada elite partai, relawan politik, pensiunan jenderal, dan keluarga inti presiden. Dengan demikian, para kroni mendapatkan manfaat lebih cepat dari lainnya, sekaligus memapankan Prabowo dalam mengonsolidasikan kekuasaan politik-ekonomi.





Linimasa Kebijakan Prabowo-Gibran 2025

3 Januari 2025

Keppres No. 1/2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional

Membentuk satuan tugas langsung di bawah Presiden untuk mengkoordinasikan percepatan hilirisasi di sektor mineral, migas, komoditas strategis lain, dan penguatan ketahanan energi. Satgas diberi mandat inventarisasi hambatan regulasi, penyelarasan perizinan, dan penyiapan peta jalan proyek prioritas. Keppres juga mengatur mekanisme pelaporan berkala ke Presiden agar pengambilan keputusan dapat dilakukan cepat.

22 Januari 2025

Impres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD TA 2025

Mengarahkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja non-prioritas, refocusing anggaran, dan penguatan monitoring belanja. Tujuannya membuka ruang fiskal bagi program unggulan populis (seperti program Makan Bergizi Gratis).

**EFISIENSI
UNTUK RAKYAT
INEFISIENSI
UNTUK PEJABAT**

16 Januari 2025

PP No.1/2025, PP No. 2/2025, PP No.3/2025.

Pembentukan Agrinas sebagai politik presiden mengakomodasi relawan pemenang dalam Pilpres 2024 serta memberi ruang gerak ekonomi bagi purnawirawan jenderal TNI. BUMN ini juga mengelola lahan-lahan yang disita oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

21 Januari 2025

Perpres No.5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan

Menetapkan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di bawah presiden. Satgas bertugas melakukan penertiban kawasan hutan melalui denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan/atau pemulihan aset kawasan hutan.

10 Februari 2025

Perpres No. 12/2025 RPJMN 2025-2029

Arah pembangunan lima tahunan: Proyek Strategis Nasional (PSN), hilirisasi, pertahanan, pangan, layanan dasar, dst. Memuat rujukan penetapan PSN, sumber pendanaan (APBN, KPBU, investasi BUMN/Danantara) hingga target makro.

17 Februari 2025

PP No. 8/2025 tentang Perubahan atas PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Wajib menempatkan 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam sistem keuangan Indonesia selama 12 bulan pada rekening khusus DHE SDA di bank nasional. Eksportir diperbolehkan menggunakan devisa untuk kegiatan operasional tertentu, namun seluruh mekanisme ditentukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

19 Maret 2025

UU No. 2/2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Revisi lanjutan UU Minerba: pengutamaan mineral/batubara untuk kepentingan nasional. Pemberian IUP dengan luas kurang dari 2.500 hektare ke UMKM, memprioritaskan pemberian WIUP kepada perguruan tinggi dan ormas, mengatur sebagian PNPB dikelola oleh menteri, Pasal 162 menjadi instrumen pembungkaman pembela lingkungan hidup.

21 April 2025

Inpres No. 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Memerintahkan jajaran kementerian/lembaga dan pmda mempercepat pembentukan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih. Memprioritaskan penganggaran, penyederhanaan proses hukum/administratif, dan koordinasi lintas-sektor untuk pendirian dan operasional koperasi desa.

24 September 2025

Permenko Perekonomian No. 16/2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN

Daftar PSN era Prabowo (228 proyek, 25 program). Memasukkan ratusan proyek konektivitas, energi, dan kawasan industri, serta mencabut beberapa PSN yang dianggap tidak prioritas. Penanggung jawab proyek dan skema pembiayaan diperbarui agar selaras RPJMN. Tetap tidak disertai lampiran kajian dampak sosial-lingkungan yang komprehensif.

24 Februari 2025

UU No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Membentuk Danantara untuk konsolidasi aset/investasi BUMN. Mempertebal logika *portofolio management*.

6 Maret 2025

Permenko Perekonomian No. 2/2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Permenko 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN

Penambahan pasal untuk menekankan penyelesaian proyek sesuai tenggat waktu. Jika tidak bisa tepat waktu, diminta memberikan revisi waktu kepada kementerian koordinator.

26 Maret 2025

UU No. 3/2025 tentang Perubahan atas UU No. 34/2004 tentang TNI

Mengubah ketentuan usia dinas/pensiun TNI (bertahap hingga 63 tahun untuk jenderal bintang 4, dengan opsi perpanjangan melalui Keppres), serta menata penugasan prajurit aktif pada 14 kementerian/lembaga tertentu (Kemenko Polhukam, Kemhan/dewan pertahanan, Setmilpres, BIN, BSSN, Lemhannas, Basarnas, BNN, BNPP, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejaksaan, MA).

19 September 2025

PP No. 45/2025 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

Memperkuat dan memperluas fungsi-fungsi operasional yang bisa dilakukan oleh Satgas PKH itu (terutama dalam aspek administratif dan penguasaan). Tidak hanya bertugas sebagai tim pelaksana penertiban, tapi juga menjadi entitas yang memiliki kewenangan rekomendasi & eksekusi administratif sendiri (pengusulan pencabutan izin, pemblokiran rekening, bahkan pencegahan ke luar negeri).

Secara kronologis, Anda akan membaca kejadian-kejadian penting dalam pembuatan kebijakan. Akan Anda lihat dalam linimasa setahun terakhir ini bahwa Prabowo bekerja dengan *playbook* mertuanya, Soeharto. Inilah era komponen kekuatan Orde Baru menopang kembali kekuasaan Indonesia pasca Reformasi. Jika kekuasaan Orde Baru Soeharto bertumpu pada ABG, akronim dari ABRI, Birokrasi dan Golkar, kini Prabowo membangunnya kembali dalam versi baru: ABRI (TNI), Badan Gizi Nasional (BGN) dan Gerindra. Dalam waktu singkat, lingkaran ABG versi baru ini telah menempati posisi strategis di pemerintahan. ABRI (TNI) memiliki peran multifungsi di ranah sipil. BGN, dengan anggaran jumbo dan dominasi pensiunan jenderal, menjadi mesin birokrasi utama rezim. Sedangkan Gerindra memimpin dengan pengaruh politik besar sampai di Pemerintah Daerah.

Jadi, selamat datang di Orde Baru paling baru.

16 Januari 2025

Presiden Prabowo menerbitkan tiga peraturan pemerintah dalam hari yang sama tentang pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) dalam bidang pangan. Ketiga PP sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 1/2025 tentang Perubahan atas PP No. 38 Tahun 1970 tentang pengalihan bentuk PN Virama Karya menjadi Persero yaitu PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).
2. Peraturan Pemerintah No. 2/2025 tentang Perubahan atas PP No. 39 Tahun 1970 tentang pengalihan bentuk PN Yodya Karya menjadi Persero yaitu PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
3. Peraturan Pemerintah No. 3/2025 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 1970 tentang pengalihan bentuk PN Indra Karya menjadi Persero yaitu PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Peraturan itu mengubah tiga BUMN Karya konsultan teknik (yaitu Virama Karya, Yodya Karya, dan Indra Karya) menjadi BUMN pangan, perikanan, dan perkebunan bernama PT Agrinas Jaladri Nusantara, PT Agrinas Pangan Nusantara, dan PT Agrinas Palma Nusantara. Pemerintah meringkai tiga perusahaan negara ini sebagai mesin swasembada nasional.

Namun, tiga peraturan ini bersifat eksekutif karena diterbitkan langsung oleh presiden tanpa mekanisme *check-and-balances* legislatif. Peraturan ini bukan pula sekadar mengubah fungsi operasional tiga BUMN sebelumnya, melainkan pengalihan korporatisasi aset publik kepada aktor negara yang dekat dengan pusat kekuasaan dan militer. Langkah ini memperkuat sentralisasi lahan dan kontrol elit atas komoditas strategis. Agrinas menguasai lahan negara seluas 425.000 hektare untuk sawit dan pangan, dikelola secara top-down dan tanpa pelibatan petani setempat.⁸ Agrinas juga akan berinvestasi Rp8 triliun untuk membangun 20 sentra produksi pangan di seluruh Indonesia, dengan mengelola >400 ribu hektare lahan, dan mendapat injeksi modal awal sekitar Rp700 miliar dari Danantara.⁹

⁸ Melynda Dwi Puspita, *Cita-cita Swasembada Pangan Prabowo, Membentuk Agrinas hingga Tarik Penyuluh Pertanian ke Pusat*, [Tempo.co](#), 21 Maret 2025. Dikutip 17 Oktober 2025.

⁹ Gayatri Suroyo, Ananda Teresia, *Indonesia's state farm company to invest nearly \$500 million to boost rice output*, [Reuters](#), 30 September 2025. Dikutip 17 Oktober 2025.

Selain itu, pengurus Agrinas berasal relawan Prabowo dalam Pilpres 2024 dan purnawirawan TNI. Tercatat:

- Agrinas Pangan: Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana sebagai Komisaris.
- Agrinas Jaladri: Laksda TNI (Purn) Eko Djalmo Asmadi sebagai Komisaris Utama.
- Agrinas Palma: Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo sebagai Direktur Utama; Letjen TNI (Purn) R. Wisnoe Prasetya Boedi (dulunya Inspektur Jenderal TNI AD) sebagai Komisaris Utama; Mayjen TNI (Purn) Meris Wiryadi sebagai Komisaris Independen; Mayjen TNI (Purn) Irwansyah sebagai Kepala Kantor Regional Riau; dan Mayjen TNI (Purn) Cucu Somantri sebagai Direktur Hukum dan Keadilan.

Ida Bagus Purwalaksana pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Asabri. Ia merupakan junior Prabowo di Kopassus, dan bekas anak buahnya saat menjabat Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Ketahanan Pangan. Ia pernah mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dalam Kabinet Jokowi.¹⁰

Eko Djalmo Asmadi adalah Ketua Umum Badan Relawan Prabowo (BRP) pada Pilpres 2024.¹¹ Agus Sutomo adalah Paspampres pada 2011-2012, kemudian menjabat Irjen Kementerian Pertahanan dan Danjen Kopassus dalam masa pemerintahan Jokowi. Ia mendapat pangkat Letjen yang diberikan Prabowo pada Agustus 2025 lalu.¹² Wisnoe Prasetya Boedi adalah Ketua DPW Perindo Jawa Timur,¹³ salah satu partai pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.



SWA -
SEMBADA
TENTARA

¹⁰ Ari Maryadi, *Sosok Ida Bagus Purwalaksana Jenderal Kopassus Calon Kuat Masuk Kabinet Prabowo-Gibran*, [Tribun Timur](#), 11 Oktober 2025. Dikutip 17 Oktober 2025.

¹¹ Eko Djalmo Asmadi mengukuhkan Badan Relawan Prabowo (BRP) Riau sekaligus melakukan pembaretan terhadap anggota organisasi bentukan Prabowo Subianto dalam foto yang diambil [AntaraFoto](#), 26 Agustus 2024. Diakses 17 Oktober 2025.

¹² Siaran pers Presiden Republik Indonesia, *Presiden Prabowo Anugerahkan Jenderal Kehormatan dan Tanda Kehormatan Bintang Sakti di Batujajar*, 10 Agustus 2025. Diakses pada 17 Oktober 2025.

¹³ [SindoNews](#), *Letjen TNI (Purn) Wisnoe Prasetya Boedi, Sosok Tepat Pimpin Partai Perindo Jatim*, 28 Januari 2023. Dikutip 17 Oktober 2025.

Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan untuk membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).¹⁴ Satgas PKH akan bertugas menindak aktivitas berusaha di kawasan hutan yang tanpa izin, termasuk sektor tambang dan perkebunan. Mereka memiliki tiga kewenangan utama: mengenakan denda administratif (*dwangsom*), menguasai kembali lahan (*bestuursdwang*), dan memulihkan aset. Artinya, melalui Satgas PKH, negara dapat menarik kembali lahan, menagih denda, lalu menyerahkan pengelolaannya kepada pihak resmi yang ditunjuk pemerintah. Segera setelah Perpres itu diteken, pemerintah mengumumkan target 3 juta hektare kawasan hutan untuk “dikembalikan” ke negara. Menhan menghadiri seremoni penyerahan 1 juta hektare tahap II, termasuk Taman Nasional Tesso Nilo di Riau dan kebun-kebun sawit sitaan di Kalimantan.¹⁵ Satgas PKH mengalihkan perkebunan sawit sitaan tersebut ke PT Agrinas Palma Nusantara. Lebih dari 800 ribu hektare perkebunan sawit berpindah tangan ke Agrinas Palma.

Perpres Satgas PKH adalah bentuk militerisasi kawasan hutan. Struktur Satgas PKH menempatkan Menteri Pertahanan sebagai Ketua Pengarah, Jaksa Agung sebagai Wakil Ketua, dan melibatkan TNI, Polri, Kemenkeu, KLHK, ATR/BPN, serta Kemenko Polhukam. Kehadiran aparat bersenjata di bawah Satgas PKH membuat komunitas adat dan petani, yang selama ini tinggal di dalam kawasan hutan tanpa pengakuan legal, merasa terintimidasi dan diperlakukan sebagai ancaman pertahanan. Padahal, sejumlah lokasi yang disebut “dikembalikan kepada negara” sudah lama menjadi ruang hidup komunitas adat.

Satgas PKH juga menjadi fondasi bagi Proyek Strategis Nasional di bidang pangan dan energi. Lahan-lahan hasil “penertiban” berpindah ke Agrinas Pangan dan Agrinas palma. Dua perusahaan ini memasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan industri biofuel. Dari sini, kebijakan penertiban kawasan hutan hingga proyek pangan nasional memperlihatkan rantai patronase yang jelas: Satgas PKH dengan tentaranya menyita lahan, Agrinas dengan pensiunan jenderalanya menerima dan mengelola lahan tersebut, kemudian hasilnya menopang program MBG dan industri biofuel. Seluruh proses ini berputar dalam orbit ekonomi politik rezim Prabowo–Gibran.



¹⁴ Perpres Satgas PKH memperkuat dasar hukum yang sudah ada, seperti Pasal 110A & 110B UU P3H (UU No. 18/2013, dengan perubahan lewat UU Cipta Kerja dan revisinya) serta PP No. 24/2021 yang mengatur mekanisme denda administratif dalam kehutanan. Lihat, Fahamsyah, Ermanto. Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban kawasan Hutan. [Hortus Archipelago](#), 21 Mei 2025. Dikutip 17 Oktober 2025.

¹⁵ [Kementerian Pertahanan Republik Indonesia](#), Menhan RI Saksikan Penyerahan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap II Seluas 1 Juta hektare, dan Penguasaan Taman Nasional Tesso Nilo, serta Kebun Kelapa Sawit Hasil Penguasaan Satgas PKH, 9 Juli 2025. Dikutip 17 Oktober 2025.

Pemerintah memberlakukan efisiensi APBN senilai Rp306,6 triliun sebagaimana diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD TA 2025. Pemangkasan anggaran ini terdiri atas efisiensi kementerian/lembaga mencapai Rp256,1 triliun dan efisiensi transfer daerah sebesar Rp50,6 triliun. Pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memakai APBN hingga Rp71 triliun pada 2025. Dari jumlah itu, serapan anggaran hingga Oktober 2025 mencapai 29% setara Rp20,6 triliun. Menteri Keuangan mendorong agar menjelang akhir tahun sisa anggaran tersebut terserap secara efektif.¹⁶

Sebagian penerima manfaat program MBG adalah tujuh yayasan yang terafiliasi dengan Presiden Prabowo. Hal ini mengindikasikan adanya bancakan terhadap proyek pemerintah. Tujuh yayasan tersebut mengelola sekitar 20-30 dapur di tujuh provinsi. Dengan estimasi setiap dapur mengelola rata-rata 3.000 porsi per hari, dengan margin keuntungan Rp2.000 per porsi, maka potensi laba mencapai Rp120 juta per dapur per bulan. Jika kroni Prabowo mengelola setidaknya 25 dapur, total laba Rp3 miliar per bulan.



¹⁶ Bayu Saputra, *Kemenkeu: MBG sudah serap anggaran Rp20,6 triliun per 3 Oktober 2025*, [AntaraNews](#), 14 Oktober 2025. Dikutip 17 Oktober 2025.

Tabel 1. Dapur MBG yang Dikelola Kroni Prabowo

Yayasan/Entitas	Keterkaitan Politik/Keluarga	Wilayah Operasi
Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)/PT GSI Kebayunan	Didirikan & dibina langsung oleh Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Didit Hediprasetyo, Sjafrie Sjamsoeddin, Simon Mantiri	Depok (Jawa Barat)
Yayasan Vieki Indira Sriwijaya	Didirikan Tri Yulia Rizki Ananda, Politikus Gerindra Palembang	Sumatera Selatan
Yayasan Sejahtera Desaku	Didirikan Kosmas Semen Janggat, eks caleg Gerindra NTT	Manggarai Barat (NTT)
Yayasan Kali Kedua Indonesia	Dipimpin Liesje Nijetjely, Ketua Kipra Kepri (Pendukung Prabowo)	Batam & Sekitarnya (Kepulauan Riau)
Yayasan Prabu Center Kosong Delapan	Pendiri Lenis Kogoya & Abednego Panjaitan. Pembina Hashim Djojohadikusumo	Bali, Banten, Bengkulu
Yayasan Kitong Bisa	Terafiliasi Billy Mambrasar, eks Stafsus Jokowi & Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua	Papua & Jawa Tengah
Yayasan Bosowa Bina Insani	Terhubung dengan keluarga Aksa Mahmud/Sadikin Aksa (keluarga eks Wapres Jusuf Kalla)	Bogor (Jawa Barat)

Diolah dari artikel "Keluarga dan Kroni Prabowo dalam Proyek Makan Bergizi Gratis", Tempo.co, 20 April 2025.

Peningkatan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun pada 2026 tidak hanya akan menguntungkan kroni Prabowo, tetapi juga konglomerasi bisnis poultry atau peternakan unggas seperti ayam. Saat ini, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) menyatakan untuk terlibat secara resmi memasok ayam ke program MBG, baik secara langsung ke dapur-dapur MBG maupun tidak langsung melalui koperasi. Komisaris Utama JPFA adalah Syamsir Siregar, eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI.¹⁷ Dia merupakan pendukung lama Prabowo.¹⁸



¹⁷ [JAPFA](#), Jajaran Dewan Komisaris, Direktur & Komite. Diakses 17 Oktober 2025.

¹⁸ [LBH Jakarta](#), 37 Jenderal Pendukung Prabowo-Hatta, 6 Jenderal Diduga Bermasalah, 7 Juni 2014. Dikutip 17 Oktober 2025.

Peraturan Presiden Nomor 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memuat 77 Proyek Strategis Nasional, antara lain Makan Bergizi Gratis dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan 9 GW Terintegrasi di Kalimantan Utara¹⁹.

Tidak ada Proyek Strategis Nasional yang dapat mewakili fusi antara kepentingan yayasan dan relawan pemenangan Prabowo-Gibran serta buruknya implementasi yang mengakibatkan belasan ribu orang keracunan selain Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG berubah menjadi jargon Makan "Beracun" Gratis. Bahkan "gratis" saja belum. Sebab menggunakan APBN ratusan triliun dan memangkas anggaran pendidikan. Para pejabat BGN sebagian besar diisi oleh pensiunan jenderal TNI yang telah lama menjadi pendukung Prabowo. Maka hanya satu kata yang diperlukan untuk menyikapi program ini: HENTIKAN!

Pemerintah tiba-tiba menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Revisi UU Minerba melanggar prosedur legislasi karena tak ada dalam daftar Prolegnas, tetapi tiba-tiba dibahas di DPR. Pembahasannya berlangsung tergesa-gesa, menutup ruang partisipasi publik, mengalienasi masyarakat dari proses legislasi yang seharusnya inklusif.

Pengesahan UU Minerba 2025 bukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan di sektor pertambangan mineral. Revisi ini juga tidak bicara penguatan transparansi, tidak memerangi korupsi di sektor tambang, tidak menawarkan solusi keluar dari ketergantungan fosil, tidak melindungi keselamatan lingkungan, serta tidak memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Sebaliknya, UU Minerba 2025 justru membuka keran pemberian izin sektor tambang, yang akan memperluas ekstraksi mineral dan batu bara di Indonesia. Dengan kata lain, ia melapangkan jalan bagi teritorialisasi total, yakni monopoli kontrol atas ruang hidup untuk sepenuhnya melayani tujuan pertambangan. Apalagi pertambangan memperoleh keistimewaan jika masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), di antaranya adalah kemudahan untuk penyesuaian dengan tata ruang di daerah, kemudahan untuk perolehan hak atas tanah, serta kemudahan untuk memperoleh pendanaan.

Pengesahannya secara mendadak di awal tahun 2025 menunjukkan bahwa rezim sedang 'pasang kuda-kuda': yakni, untuk mengamankan agenda perluasan ekonomi tambang ke depan, dan untuk melakukan pembungkaman terhadap sumber-sumber kekuatan oposisi melalui pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.

¹⁹ [JDIH BPK](#), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Diakses 17 Oktober 2025.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pasca Reformasi 1998, rakyat luas menuntut untuk menghapus dwifungsi ABRI dan melakukan reformasi di sektor keamanan agar lebih berlandaskan prinsip dan nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi tonggak berakhirnya dwifungsi tersebut. Aturan ini melarang prajurit aktif terlibat dalam bisnis dan politik praktis, menghapus fraksi TNI/Polri di parlemen, serta membatasi jabatan sipil yang boleh diisi prajurit aktif hanya pada 10 posisi yang relevan dengan keahliannya.²⁰

Namun, semangat reformasi itu perlahan memudar. Pelibatan militer di ranah sipil kembali menguat, baik melalui berbagai nota kesepahaman antara lembaga sipil dan TNI hingga penggunaan mereka untuk mengamankan Proyek Strategis Nasional. Pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden semakin menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya militer. Prabowo berasal dari TNI, pernah memimpin Komando Pasukan Khusus, dan berperan besar dalam penculikan aktivis 1998 yang dilakukan Tim Mawar.²¹ Ia menjadikan militer sebagai tulang-punggung petualangan karir politiknya selama belasan tahun. Ketika belum 100 hari memimpin Republik, Prabowo Subianto memperbesar organisasi TNI dan menempatkan bekas kolega dan bawahannya di militer untuk mengisi jabatan penting, seperti di BUMN. Puncaknya, secara mendadak dan cacat formil, rezim ini memasukkan Revisi UU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan mengesahkannya pada 26 Maret 2025.

Alih-alih memperkuat profesionalisme pertahanan, revisi ini memperluas peran militer di ranah sipil. Dengan dalih “kebutuhan strategis” dan memperluas pemaknaan Operasi Militer Selain Perang (OSMP), aturan baru ini memberi ruang lebih luas bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga, sekaligus memperpanjang masa dinas/usia pensiun mereka. Dengan kebijakan baru ini, TNI bukan lagi sekadar alat pertahanan di bawah kontrol sipil, tetapi merupakan aktor kebijakan dalam pemerintahan itu sendiri. Dengan kata lain, Pemerintahan Prabowo mengukuhkan TNI sebagai kekuatan utama penopang rezim. Dari perspektif reformasi sektor keamanan, ini adalah langkah mundur dari semangat demiliterisasi 1998, karena membawa militer kembali ke ranah eksekutif, bukan menjauhkan mereka dari politik praktis.



²⁰ KontraS, “Kegagalan Reformasi Sektor Keamanan dan Menguatnya Militerisme: Kertas Kebijakan Hari TNI ke-80”. Jakarta: KontraS, Oktober 2025.

²¹ Made Supriatma, (2014, 27 Mei), “Melacak Tim Mawar”. IndoProgress.com. Diakses 22 Oktober 2025.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi.²² KDMP mencerminkan ambisi redistribusi ekonomi ala Prabowo, tetapi di tahap awal menunjukkan asimetri antara kecepatan kebijakan pusat dan kesiapan struktur lokal.

Inpres dan rencana Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri yaitu Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan, dan Danantara pada 9 Oktober 2025 menandai fase akselerasi.²³ Namun tanpa kejelasan mekanisme pembiayaan, kapasitas koperasi, serta akuntabilitas dana, program ini berpotensi menjadi "mega-proyek administratif" ketimbang penggerak ekonomi desa yang nyata.

Saat ini KDMP akan memakai dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia yang ditransfer ke Himbara serta dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp16 triliun.²⁴ Program ini tidak transparan sejak awal dan berjalan tanpa pengawasan mumpuni. Terkesan asal jalan. Antara lain dibuktikan baru adanya pendamping pada September, berselang empat bulan setelah Inpres diundangkan. Program terkesan *top down*, sehingga meningkatkan risiko tata kelola yang berujung gagal bayar dan kredit meningkat. Apalagi banyak koperasi tidak siap secara legal dan bisnis.

Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, menjadi mitra PT Kayan Hydro Energy (KHE), perusahaan pengembang PLTA Kayan yang berstatus PSN berdasar Perpres 12/2025.²⁵ Hashim datang ke lokasi tapak PLTA di Desa Long Lejuh, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kaltara. PT ITCI Kayan Hutani milik Hashim mendapat keuntungan dari proyek karena sebagian lahan akan menjadi tempat genangan yang berperan penting untuk berdirinya bendungan. Dengan kata lain pemakaian konsesi ITCI untuk area genangan bendungan akan berbuah kompensasi dan keuntungan bagi ITCI.²⁶

²² [JDIH BPK](#), *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025*. Diakses 17 Oktober 2025.

²³ Suparjo Ramlan, Sakina Rakhma Diah Setiawan, *SKB Diteken, Pemerintah Percepat Pembangunan Gerai dan Gudang Kopdes Merah Putih*, [Kompas.com](#) 10 Oktober 2025. Dikutip 17 Oktober 2025

²⁴ Muhammad Farhan, *KDMP Dapat Kucuran 200 T, Pembangunan Infrastruktur Koperasi Dikebut*, [Investor Daily](#), 17 September 2025. Dikutip 17 Oktober 2025.

²⁵ Sabrina Rhamadanty, *Begitu Tanggapan Kayan Hydro Energy Soal Minat Investasi dari Hashim Djojohadikusumo*, [Kontan.co.id](#), 30 Mei 2024. Dikutip 17 Oktober 2025.

²⁶ [Tempo.co](#), *Bagaimana Hashim Djojohadikusumo Masuk Megaprojek PLTA Kayan*, 19 September 2025. Dikutip 17 Oktober 2025.

30 Juni 2025

Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.²⁷ Kebijakan ini menjadikan IKN tetap berlanjut sebagai proyek strategis, sekaligus menguntungkan perusahaan milik adiknya, Hashim Djojohadikusumo. PT ITCI Kartika Utama memiliki lahan di lokasi inti IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara.²⁸ Pada April 2025, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menjalin kerja sama dengan PT ITCI Kartika Utama dan PT Arsari Tirta untuk menyediakan air bersih di Penajam Paser Utara.²⁹

Berdasarkan laporan masyarakat sipil, keberadaan PT ITCI Kartika Utama di Penajam Paser Utara tidak lepas dari konflik dengan warga Desa Telemow, Sepaku. Warga menganggap perusahaan Hashim menyerobot tanah mereka yang dihuni selama puluhan tahun. Proses penguasaan lahan tersebut tidak transparan dan melanggar hak warga atas tanah.³⁰

24 September 2025

Pemerintah Indonesia dan Kanada menyepakati Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA). Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Kanada. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melonggarkan 85,8% tarif untuk barang-barang Kanada dan Kanada berkomitmen untuk menghilangkan 90,5% tarif untuk barang-barang Indonesia.³¹

15 Oktober 2025

Dengan memanfaatkan momentum perjanjian ICA-CEPA, PT Arsari Tambang, milik Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana akuisisi tambang di Kanada senilai Rp7 triliun pada Juni 2026. Perusahaan keluarga Prabowo menikmati manfaat dan keuntungan dari kebijakan pemerintah menjadikan ini sebagai bentuk konflik kepentingan yang jelas dan nyata.³²

²⁷ Muhibar Sobary Ardan, *IKN jadi ibu kota politik pada 2028, apa maksudnya?*, [BBC Indonesia](#), 23 September 2025. Dikutip 17 Oktober 2025.

²⁸ Shafira Cendra Arini, *Cerita Hashim Adik Prabowo, Punya Hutan dan Tanah di Kawasan IKN*, [detikFinance](#), 31 Agustus 2024. Dikutip 17 Oktober 2025.

²⁹ [Diskominfo Kab. Penajam Paser Utara](#), *Pemda PPU Jalin Kerjasama Dengan PT Arsari Tirta Pradana dan PT ITCI Kartika Utama Terkait Pengelolaan Air Bersih*, 9 April 2025. Dikutip 17 Oktober 2025.

³⁰ Ardan, *Desa Telemow: Yang Diincar Perusahaan Hashim*, [Betahita.id](#), 24 Maret 2025. Dikutip 17 Oktober 2025.

³¹ Rolando Fransiscus Sihombing, *RI dan Kanada Resmi Teken ICA-CEPA, Disaksikan Prabowo dan PM Carney*, [detikNews](#), 25 September 2025. Dikutip 17 Oktober 2025.

³² M Ryan Hidayatullah, *Perusahaan Adik Prabowo Siapkan Rp7 Triliun untuk Akuisisi Tambang di Kanada*, [Bisnis.com](#), 15 Oktober 2025. Dikutip 17 Oktober 2025.

Rapuhnya Ekonomi

Transi energi global yang semula dipromosikan sebagai langkah menuju ekonomi hijau, kini berubah arah menjadi transisi mineral. Ini menyebabkan perburuan besar atas nikel, bauksit, dan timah sebagai bahan baku industri energi 'bersih'. Di balik narasi dekarbonisasi, logika ekstraktivisme tetap dominan. Sebab, logikanya hanya mencari substitusi dari energi fosil yang dianggap kotor, sementara negara penghasil sumber daya seperti Indonesia kembali ditempatkan sebagai 'dapur kotor', yang memasok bahan mentah dalam rantai pasok global.

Kondisi ini menjadikan Indonesia sasaran empuk bagi para kapitalis global dan oligark ekstraktif yang bersekongkol menangkap peluang dari ledakan permintaan mineral kritis. Dengan dalih transisi energi, maka hutan, tanah, dan ruang hidup rakyat seolah-olah halal dibongkar besar-besaran. Di titik inilah politik-ekonomi ekstraktif berubah wujud menjadi proyek negara yang dilekatkan dengan berbagai narasi heroik seperti swasembada energi, pembangunan hijau, ekonomi berkelanjutan, hingga transisi 'bersih'.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan gejala menuju krisis yang sempurna. Namun akar persoalannya bukan semata faktor global, melainkan struktur ekonomi nasional yang rapuh dan bergantung pada sektor ekstraktif seperti batu bara, nikel, dan sawit. Di bawah narasi transisi energi dan hilirisasi, rezim justru melanggengkan pola eksploitasi sumber daya alam, menjadikan Indonesia medan perburuan baru bagi oligark global.

Melalui skema ekonomi komando, Prabowo mempercepat kecenderungan ini dengan memusatkan kendali sumber daya strategis pada birokrasi militeristik. Negara mengatur produksi, distribusi, dan investasi atas nama stabilitas nasional, tetapi sesungguhnya untuk menjamin keuntungan oligark. Model ekonomi seperti ini tidak hanya menghidupkan kembali pola pembangunan otoritarian ala Orde Baru, tetapi juga melumpuhkan ruang deliberasi publik yang dijaga penuh oleh aparatus kekerasan melalui penguatan supremasi militer.

Kekuatan ekonomi yang terkomando di bawah orkestrasi seorang presiden ini berdampak langsung pada kemunduran demokrasi dan memberi alarm peringatan keras terhadap peluang terjadinya regresi ekonomi. Model pembangunan yang bertumpu pada ekstraktivisme dan ekonomi komando ini seolah-olah menjadi resep sempurna bagi kelahiran krisis baru berupa kerapuhan ekonomi.

Tanda Krisis Sudah Dekat

Satu tahun Prabowo-Gibran telah menjabat, ekonomi menunjukkan tanda-tanda menuju pada *perfect storm* atau badai yang sempurna. Hampir pada sebagian besar indikator fundamental makro-ekonomi menunjukkan penurunan. Mulai dari penerimaan pajak yang anjlok, utang yang naik tajam, hingga industri yang tertekan. Masalah eksternal seperti perang dagang dan rontoknya harga komoditas turut berkontribusi, tapi bukan menjadi penyebab utama ekonomi Indonesia.

Struktur ekonomi Indonesia yang rapuh, bergantung pada sektor ekstraktif ditengarai menjadi penyebab utama. Sebab hanya mengandalkan pada eksploitasi sumber daya alam mencakup batu bara, nikel dan sawit. Mantra hilirisasi untuk mendongkrak ekonomi sebenarnya semu. Prabowo hanya melanjutkan olahan primer dengan mengubah bijih nikel menjadi barang setengah jadi yang masih harus diolah menjadi produk jadi, sehingga, watak hilirisasi ini sebenarnya tetap ekstraktif, bertumpu eksploitasi alam. Dengan luas tambang nikel mencapai 592.302,78 hektare³³ setara luas 9 kali Jakarta, ekstraksi yang terus berlanjut berdampak terhadap *oversupply* produksi nikel. Harga nikel yang turun memicu pemangkasan operasional pada 28 *line* pada sejumlah smelter³⁴ dan memicu pemutusan hubungan kerja di sejumlah smelter.

Dengan bertumpu pada ekonomi ekstraktif, nasib sama dialami oleh industri batu bara yang rapuh terhadap sentimen harga. Saat harga batu bara anjlok 27,5%³⁵ secara *year-on-year* pada 2025, kebijakan listrik nasional memunculkan proyek PLTU baru dengan jumlah kapasitas baru sebesar 6,3 GW hingga 2034 mendatang. Di luar rencana pemerintah menambah PLTU, industri juga memiliki rencana membangun PLTU *captive* untuk menopang kawasan seperti sentra nikel.

³³ Analisis Suplai Penyebaran Pertambangan Nikel Indonesia, [ICN](#), 25 Februari 2025. Dikutip 22 Oktober 2025.

³⁴ Muliawati, Firda Dwi, 28 Line Smelter Nikel RKEF Berhenti Beroperasi, Ini Biar Keladnya, [CNBC Indonesia](#), 10 Juli 2025. Dikutip 22 Oktober 2025.

³⁵ Paolo Agnolucci, Nikita Makarenko, eakening demand, steady supply: What's driving coal's price decline in 2025?, 21 Juni 2025, [Blogs World Bank](#). Dikutip 22 Oktober 2025.



**Tabel 2. Rencana Penambahan PLTU baru 6,3 GW dalam
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034**

No	Nama Proyek	Lokasi	COD	Kpsts (MW)	Pengembang	Status	Kategori
1	PLTU Jawa-9 & 10 (Suralaya 9-10)	Jawa	2025	2000	IPP	Konstruksi	PLTU Non-MT (IPP)
2	PLTU MT Sumsel-1	Sumatera	2025	600	IPP	Konstruksi	PLTU Mulut Tambang (Committed)
3	PLTU MT Jambi-1	Sumatera	2030	600	IPP	PPA IPP	PLTU Mulut Tambang (Committed)
4	PLTU MT Jambi-2	Sumatera	2032	600	IPP	Rencana	PLTU Mulut Tambang (Committed)
5	PLTU Sumatera Hybrid	Sumatera	2032	600	IPP	Rencana	PLTU Mulut Tambang Hibrida EBT
6	PLTU Sumatera Hybrid	Sumatera	2033	600	IPP	Rencana	PLTU Mulut Tambang Hibrida EBT
7	PLTU MT Sumbagsel-1	Sumatera	2028	300	IPP	Konstruksi	PLTU Mulut Tambang (Committed)
8	PLTU Sumut-1	Sumatera	2028	300	Kerja Sama Wilus	Konstruksi	PLTU Non-MT (PLN - Sumatera)
9	PLTU MT Hybrid Kalselteng 4	Kalimantan	2032	200	IPP	Rencana	PLTU Mulut Tambang Hibrida EBT
10	PLTU Parit Baru	Kalimantan	2030	100	PLN	Dilanjutkan	PLTU Non-MT
11	PLTU Pantai Kura-Kura	Kalimantan	2030	55	PLN	Konstruksi	PLTU Non-MT
12	PLTU Sampit / Bagendang	Kalimantan	2033	50	PLN	Konstruksi	PLTU Non-MT
13	PLTU Atambua	NTT	2030	24	PLN	Dilanjutkan	PLTU Non-MT
14	PLTU Bima	NTT	-	20	PLN	Dilanjutkan	PLTU Non-MT
15	PLTU Kotabaru	Kalimantan	2033	14	PLN	Konstruksi	PLTU Non-MT
16	PLTU Tanjung Selor	Kalimantan	2033	14	PLN	Konstruksi	PLTU Non-MT
17	PLTU Sorong	Papua	2025	14	PLN	Rencana	PLTU Non-MT
18	PLTU Tarakan	Kalimantan	-	14	PLN	Operasi	PLTU Non-MT
19	PLTU Timika (Relokasi Sorong)	Papua	-	14	PLN	Relokasi	PLTU Non-MT
20	PLTU Soffi	Maluku	-	6	PLN	Rencana	PLTU Non-MT
21	PLTU Talaud	Sulawesi	-	6	PLN	Konstruksi	PLTU Non-MT
22	PLTU Alor	NTT	-	6	PLN	Dilanjutkan	PLTU Non-MT
23	PLTU Rote Ndao	NTT	-	6	PLN	Dilanjutkan	PLTU Non-MT
24	PLTU Sulut 1	Sulawesi	2025	100	PLN	Konstruksi	PLTU Non-MT
25	PLTU Palu 3	Sulawesi	2025	100	PLN	Konstruksi	PLTU Non-MT

**Diolah Trend Asia dari Dokumen RUPTL 2025-2034.*

Pada saat bersamaan, Prabowo kesulitan untuk mengatur kebijakan fiskal secara proper. Corak ekstraktivisme menyebabkan tekanan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PNBP tergerus 20% pada akhir September 2025 akibat anjloknya harga komoditas sekaligus pengalihan dividen perusahaan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di samping itu, penerimaan pajak secara umum sempat anjlok 13,5% pada Triwulan-1 2025, disebabkan lemahnya permintaan masyarakat. Tanda ekonomi memburuk dari sisi fiskal sudah kelihatan, tapi tidak segera mendapat perhatian serius.

Pemerintah justru “buta dan tuli” terhadap situasi fiskal dan bersikap agresif pada program bermasalah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Selain boros anggaran dan tidak mendapat evaluasi memadai dari legislatif, program ini juga tidak berdampak secara inklusif ke penerima dan tidak menambah lapangan kerja secara eksponensial. Tanpa memikirkan fiskal yang keropos akibat program strategis, berdampak pada penambangan utang untuk mendanai program lain. Tercatat sepanjang Januari-September 2025, pemerintah menambah utang Rp458 triliun, naik tajam 31,7% dibanding posisi tahun sebelumnya. Artinya, laju penerbitan utang melebihi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang hanya berkisar 5%. Utang makin tidak produktif dan jadi beban pembayar pajak.

Beban bunga utang pemerintah sepanjang 2015-2025 telah melonjak 254%. Sementara pos belanja perlindungan sosial naik 57%, lebih kecil dari beban bunga, dan belanja subsidi naiknya 66%. Ini bukti Indonesia layak disebut gagal sistemik. Antara belanja yang sifatnya ke kesejahteraan rakyat dengan belanja bunga utang, lebih tinggi yang terakhir. Siapa yang menanggung semua utang ini? Jelas para pembayar pajak, yang notabene didominasi pekerja kelas menengah.

Kelas menengah alami penyusutan atau terjadi fenomena *shrinking middle class*. Indonesia kehilangan sembilan juta orang kelas menengah dalam waktu 3 tahun terakhir. Nampaknya penyusutan kelas menengah di era Prabowo makin besar. Pajak dan iuran yang menyasar kelas menengah terus meningkat, padahal pemerintah pelit memberikan stimulus. Sebagai catatan kelas menengah punya andil 66% terhadap total pendapatan masyarakat. Jika kelas menengah sedang menyusut, sakit, maka ancaman nyata bagi konsumsi rumah tangga. Bagaimana mungkin Prabowo mau capai pertumbuhan 8%, kalau kebijakannya anti-kelas menengah.



Tabel 3. Postur Belanja Pemerintah Pusat 2015-2025

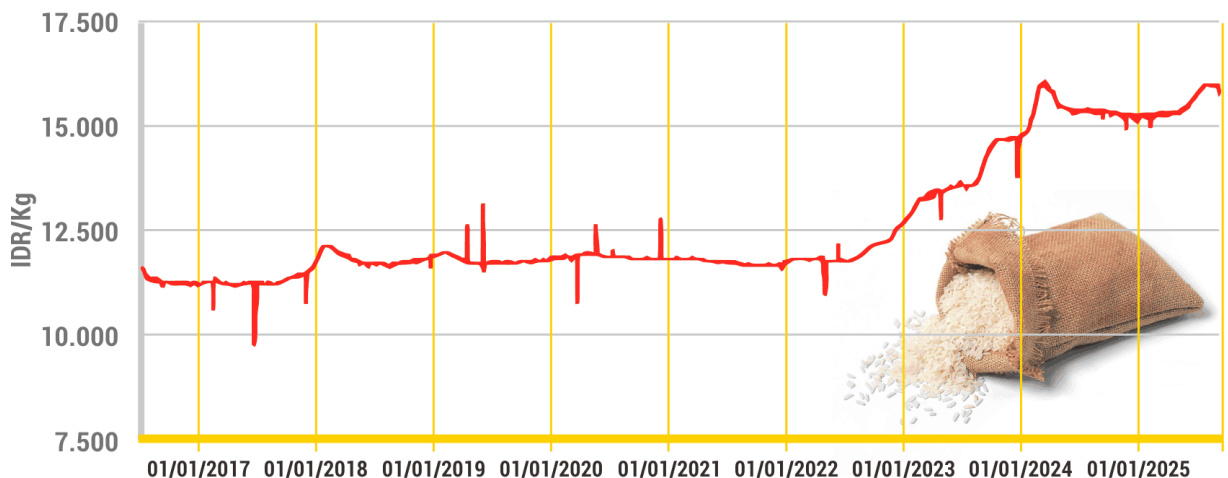
Jenis Belanja	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**	Kenaikan 2020- 2025	Kenaikan 2015- 2025
Pegawai	281.1	305.1	312.7	346.9	376.1	380.5	387.8	416.6	442.6	460.9	513.2	35%	83%
Barang	233.3	259.6	291.5	347.5	334.4	422.3	530.1	406.0	379.3	436.9	342.6	-19%	47%
Modal	215.4	169.5	208.7	184.1	177.8	190.9	239.6	232.8	199.1	338.9	190.6	0%	-12%
Bunga Utang	156.0	182.8	216.6	258.0	275.5	314.1	343.5	403.9	441.4	498.9	552.8	76%	254%
Subsidi	186.0	174.2	166.4	216.9	201.8	196.2	242.1	284.6	297.2	313.8	309.0	57%	66%
- Energi	119.1	106.8	97.6	153.5	136.9	108.8	140.4	208.9	210.7	192.8	204.5	88%	72%
- Non-energi	66.9	67.4	68.8	63.4	64.9	87.4	101.7	75.7	86.5	121.1	104.5	20%	56%
Hibah	4.3	7.1	5.4	1.5	6.5	6.3	4.3	5.0	0.0	6.6	0.2	-97%	-97%
Perlindungan Sosial	97.2	49.6	55.3	84.3	112.5	202.5	173.7	143.7	148.6	153.3	152.7	-25%	57%
Lainnya	10.1	6.0	8.8	16.2	11.7	120.0	79.7	477.5	321.9	355.4	631.8	427%	6.155%
Total	1,183	1,154	1,265	1,455	1,496	1,833	2,001	2,370	2,230	2,558	2,693	47%	128%

Sumber: Nota Keuangan APBN 2025

Tekanan ekonomi yang dirasakan kelas menengah juga bisa dirasakan karena naiknya harga kebutuhan pokok. Harga beras naik tajam, meski diklaim *food estate* terus ekspansi, pasokan beras tertinggi sepanjang sejarah. Ada data beras yang janggal. Ada permainan di rantai pasok, sehingga klaim empat juta ton stok beras, tidak tercermin di harga pasar tradisional.

Bahkan harga beras di Merauke, lokasi *food estate* menjadi salah satu yang kenaikannya paling tinggi dibanding daerah lainnya. *Food estate* jelas proyek gagal. Berbiaya mahal, merusak alam, tapi gagal dalam meningkatkan stabilitas pasokan pangan dan harga. Harga beras menjadi *proxy* kegagalan kebijakan satu tahun Prabowo, padahal berulang kali ia bermimpi soal swasembada pangan ala Orde Baru di bawah Soeharto.

Ilustrasi 2. Harga Rata-Rata Beras di Pasar Tradisional



Sumber: BI, CEIC 2025

Serampangan Mengelola Anggaran

Saat rakyat harus mengencangkan ikat pinggang, menelan sendiri segala sumpah serapah akan ketidakpastian, pengelolaan anggaran justru tak segan mengabaikan rakyat tanpa perlindungan. Kita bisa melihat bahwa alokasi anggaran kian tak rasional di tengah melambatnya ekonomi rakyat. Hal ini tercermin dari bagaimana pemerintah mengelola fiskal Indonesia.

Peningkatan drastis terjadi untuk anggaran pada fungsi pertahanan (166,5%), ketertiban dan keamanan (52,4%) selama 2021-2025. Pada saat yang bersamaan, peningkatan anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) hanya sebatas 2,5%. Ditambah lagi, anggaran untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan serta pariwisata justru tumbuh negatif.

Meskipun anggaran untuk pendidikan tumbuh 181,3%, namun angka ini belum dikurangi alokasi untuk dana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga akan meminta jatah dari sektor pendidikan dalam APBN 2025 dan 2026. Dalam kacamata penganggaran, MBG melakukan penyerapan sangat rendah, tapi justru anggaran ditambah. Sementara itu, kita juga bisa melihat, penganggaran yang tidak adil kepada masyarakat. Dibandingkan dengan PDB 2024, anggaran pertahanan, ketertiban dan keamanan memiliki porsi yang lebih besar masing-masing 1,5% dan 1,1% dibandingkan perlinsos yang hanya 1,3%. Penataan ini bukan hanya sekedar salah tata kelola, namun juga mencerminkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya, kalau enggan disebut absennya kehadiran negara.

Dalam satu tahun kita melihat bahwa ekonomi ekstraktif menghasilkan ketimpangan alih-alih kesejahteraan bagi masyarakat. Justru model ekonomi itu rapuh dengan gejolak regional. Sementara tidak tersedia cara-cara lain mengerek pendapatan. Padahal sudah jelas ada potensi pajak besar yang selama ini diabaikan seperti memajaki orang kaya dan super kaya dari sisi kekayaannya atau dikenal dengan pajak kekayaan (*wealth tax*) yang nilainya fantastis mencapai Rp 81 triliun³⁶.

Pada akhirnya kita melihat bahwa pemerintah mulai meninggalkan disiplin fiskal dalam mengelola anggaran serta mengurangi belanja berorientasi kesejahteraan sosial. Sebaliknya belanja program prioritas seperti MBG yang sangat kontroversial telah menggerus anggaran pendidikan. Rezim ini menggunakan anggaran bukan didasarkan pada kepentingan publik, melainkan elite yang berada di lingkaran kekuasaan.

ANGGARAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
DIPANGKAS, TAPI ANGGARAN
KESEJAHTERAAN KRONI
DIPERDERAS



³⁶ CELIOS Dorong Wealth Tax 2 Persen, Potensi Rp81 Triliun dari 50 Crazy Rich, [IKPI](#). Dikutip 22 Oktober 2025.

Tabel 4. Tata Kelola Fiskal Indonesia

Fungsi	2025–2026*	2021–2026	2016–2026	% Thdp PDB 2024
Perlindungan sosial	2,4	2,5	103	1,3
Pertahanan	36,7	166,5	241,2	1,5
Ketertiban dan keamanan	4,4	52,4	111,5	1,1
Ekonomi	16,0	77,8	184,5	3,7
Perlindungan lingkungan hidup	59,3	-4,6	49,4	1,0
Perumahan dan fasilitas umum	48,8	-6,5	2,9	1,0
Kesehatan	22,5	-27,7	156,2	0,7
Pariwisata	7,1	-27,9	-32,3	0,1
Agama	8,0	41,3	68,7	0,1
Pendidikan	47,5	181,3	246	2,1
Pelayanan umum	8,6	43,9	188,2	3,6
*Outlook APBN 2025, *RAPBN 2026, Nota Keuangan 15 Agustus 2025.				

Sumber: Kementerian Keuangan, Nota Keuangan APBN, berbagai tahun (diolah CELIOS)



Danantara: Instrumen Politik-Ekonomi Rezim

Narasi besar kebijakan Prabowo bertumpu kepada Asta Cita. Delapan butir cita-cita kepemimpinan. Kata kunci Asta Cita antara lain terletak pada “pertahanan”, “swasembada pangan dan energi”, “hilirisasi”, “pemberantasan kemiskinan”. Untuk menjalankan cita-cita tersebut, perlu dana besar dari kantong sendiri untuk menjalankannya, sebab belum tentu ada investor yang berminat mendanainya.

Prabowo melihat masa depan pendanaan itu ada di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan jumlah aset ribuan triliun rupiah. Dalam waktu singkat setelah disumpah menjadi Presiden Indonesia ke-8, disusun rencana untuk mengamandemen Undang-Undang BUMN. Hanya dalam waktu empat hari³⁷ UU BUMN diubah untuk memuluskan rencana pemanfaatan aset-aset BUMN guna mendanai cita-cita tersebut.

Terbitlah UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Disusul dengan peraturan teknis pembentukan Danantara dan pengangkatan Dewan Pengawas serta Badan Pelaksana. Kemudian, disusul juga dengan perubahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Pengatur (BP) BUMN berdasarkan UU 16/2025 per 6 Oktober 2025. Status pegawai BUMN pun menjadi tidak jelas karena frasa “penyelenggara negara” dihilangkan, sehingga potensial memicu informalisasi pekerja di sektor BUMN. Tidak pernah terjadi sebelumnya, sebuah UU dan aturan turunan terbit secepat ini.

Prabowo memiliki diskresi mutlak dalam mengangkat dan memberhentikan dewan pengawas, anggota badan, dan penasihat *sovereign wealth fund* yang mengelola aset BUMN sekitar Rp14.000 triliun³⁸. Ketika UU BUMN direvisi kembali pada September 2025, pasal yang memberikan kewenangan tunggal kepada presiden tetap dipertahankan.

Prabowo menyebut *initial funding* Danantara senilai US\$20 miliar (sekitar Rp326 triliun) akan difokuskan pada 20 Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, serta pembangunan pusat data AI, kilang minyak, petrokimia, pangan, perikanan, dan EBT. Namun, arah investasi ini lebih berpihak pada kepentingan korporasi besar ketimbang publik. Sektor nikel misalnya, mayoritas proyek smelter PSN dikuasai perusahaan asal Tiongkok yang mengendalikan rantai produksi dari teknologi hingga ekspor hasil olahan.

Dengan demikian, Danantara sebagai *sovereign wealth fund* yang diklaim untuk mengoptimalkan aset negara demi kesejahteraan nasional, tampak hanya menjadi instrumen politik-ekonomi rezim. Struktur pengurus yang diisi loyalis politik, kekuasaan tanpa kontrol efektif, serta absennya regulasi antikorupsi yang kuat menjadikan pengelolaan Danantara berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan dan korupsi di masa depan.

³⁷ RUU BUMN dibahas Kilat Hanya 4 Hari, Ini Poin-poin Pentingnya!, [Bisnis.com](https://bisnis.com), 26 Desember 2024. Dikutip 23 Oktober 2025.

³⁸ Pasal 3N ayat (2), 3Q ayat (3), dan 3W ayat (4) UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)





Sekilas Danantara

Dasar Hukum Danantara

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
3. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.

Tugas

Mengutip Pasal 3E Ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, tugas utama Danantara terdiri dari:

1. Mengelola dividen dari berbagai holding investasi, operasional, dan BUMN.
2. Menyetujui perubahan modal BUMN yang bersumber dari dividen.
3. Mengatur restrukturisasi BUMN, termasuk merger, akuisisi, dan pemisahan usaha.
4. Membentuk *holding* investasi, operasional, serta BUMN baru.
5. Menyetujui penghapusan aset dalam tagihan BUMN.
6. Berkonsultasi dengan DPR RI terkait rencana kerja dan anggaran (RKA) *holding* investasi dan operasional.

Dengan demikian Danantara akan mengelola dividen dari *investment holding*, *operations holding*, dan sebagainya. Kemudian Danantara juga dapat memberikan persetujuan penambahan/pengurangan modal dalam *investment holding*, dan *operations holding*. Serta menyetujui restrukturisasi (merger, akuisisi, *spin-off*, dan sebagainya). Dan juga Danantara juga diperbolehkan melakukan investasi langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga atau *joint operation*/manajemen aset operasi dengan pihak ketiga.

Aset

Danantara akan menjadi lembaga pengelola modal terbesar di Indonesia. Badan ini diproyeksikan mengelola aset sekitar USD 900 miliar atau sekitar Rp14,715 triliun. Aset yang dikelola berasal dari tujuh BUMN yang sudah holding maupun tidak yaitu BRI, Mandiri, BNI, Pertamina (punya anak usaha listing di bursa PGN/PGAS, PGEO & Elnusa), PLN, Telkom & MIND ID (Bukit Asam, Aneka Tambang, dan Timah).

Dari tujuh perusahaan ini, total ada sembilan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu:

1. Bank Rakyat Indonesia (BBRI)
2. Bank Mandiri (BMRI)
3. Bank Negara Indonesia (BBNI)
4. Tiga anak perusahaan Pertamina yaitu Perusahaan Gas Negara (PGAS); Pertamina Geothermal Energy (PGEO); dan Elnusa (ELSA).
5. Tiga anak perusahaan MIND ID yaitu Bukit Asam (PTBA); Aneka Tambang (ANTM) dan Timah (TINS).

Kebal Dari Hukum

Masalah pasal-pasal yang membuat pengurus Danantara kebal dari hukum merupakan salah satu sumber ketidakpercayaan publik meliputi:

1. Badan Pemeriksa Keuangan tidak lagi menjadi auditor laporan keuangan tahunan. Danantara akan diaudit oleh auditor terdaftar di BPK, tetapi tidak oleh BPK.
2. BPK dapat mengaudit dengan tujuan tertentu sepanjang merupakan inisiatif dari DPR.
3. Kerugian BUMN/Danantara bukanlah kerugian negara
4. Direksi tidak dapat dipidana karena kerugian BUMN/Danantara

Salah satu dasar kebal dari hukum adalah *Business Judgment Rule* (BJR) di mana asas ini memiliki tujuan baik dalam kondisi perusahaan yang baik dan sehat. Direksi mendapatkan proteksi dari tindakannya selama tujuannya adalah hal baik. Hal ini bertentangan dengan situasi yang berada di balik berdirinya Danantara.

Dengan mencampurkan kepentingan politik dan bisnis yang sudah tercermin di struktur penasehat, pengawas, dan direksi, maka BJR akan menjadi tameng buruknya investasi di masa depan. Rekam jejak mereka terhadap *conflict of interest* di berbagai sektor di masa lalu memicu kekhawatiran masa depan Danantara. Salah satunya berkaitan motif politik dari presiden saat ini yang dikhawatirkan menggunakan Danantara untuk Pemilu 2029. Apalagi dia baru-baru ini menyatakan akan maju untuk pemilu berikutnya.



Danantara Indonesia

PEMBINA



Prabowo
Presiden RI ke 8



Ketum DPP
Gerindra

DEWAN
PENASEHAT



Joko Widodo
Presiden RI ke 7



**Susilo Bambang
Yudhoyono**
Presiden RI ke 6



Majelis Tinggi
Partai Demokrat

BADAN
PELAKSANA

CHIEF
EXECUTIVE
OFFICER
(CEO)



Rosan Roeslani
Menteri Investasi
& Hilirisasi



Ketua TKN
Prabowo Gibran
Presiden Komisaris &
Pemegang Saham



**Sandiaga
Uno**
Mantan
Menteri
Pariwisata
(2020-2024)



Presiden Komisaris
& Pemegang Saham
(Holding Investasi)



Pendiri
& Pemilik
Saham

CHIEF
OPERATING
OFFICER
(COO)



**Dony
Oskaria**
Wakil Menteri
BUMN



Pemilik Saham
Wakil
Komisaris
Utama



Pendiri
& Pemilik
Saham



Komisaris
& Pemilik
Saham



**Raffi
Ahmad**
Staffsus Presiden
Bidang Pembinaan
Generasi Muda



**Kaesang
Pengarep**
Ketum PSI

CHIEF
INVESTMENT
OFFICER
(CIO)



**Pandu
Patria
Sjahrir**
Pengusaha

Wakil Bendahara Umum
TKN Prabowo-Gibran

Mantan Anggota Satgas
Omnibus Law Cipta Kerja

Komisaris
Utama



Wakil
Direktur
Utama



Komisaris
Utama



Komisaris
Utama



Ketua
Umum
Asosiasi



**Luhut Binsar
Panjaitan**
Ketua Dewan
Ekonomi
Nasional
Indonesia

Pendukung
Prabowo-Gibran

Menko Marves
2019-2024

Pemilik
Saham



Pendiri

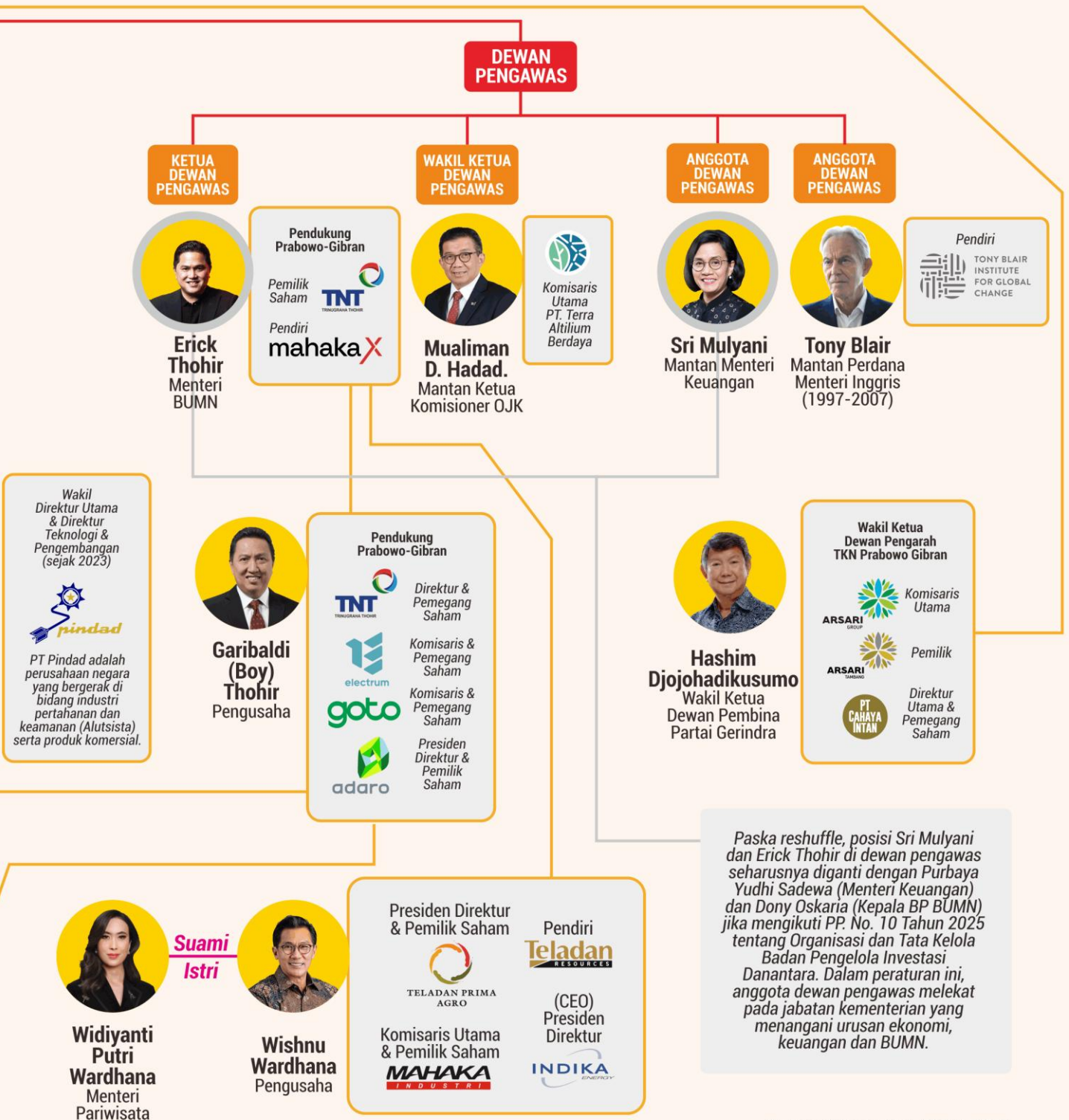


CHIEF
TECHNOLOGY
OFFICER
(CTO)



**Sigit Puji
Santosa**
Per 26 Okt 2025,
Sigit bergabung
menjadi bagian
dari Danantara

— Struktur Kepengurusan
— Jejaring Bisnis



Sumber: Direpro dari JATAM, 2025

Aktor dan Operator Danantara: Kotor Sejak Dari Awal

Ketika Danantara diluncurkan struktur pengurus sudah menunjukkan potensi masalah di masa depan. Mereka berada dalam lingkaran kekuasaan sebelumnya yang bermasalah. Terlibat dalam kebijakan publik yang buruk dan tidak punya kompetensi mengurus dana publik yang sangat besar. Sederhananya mereka kotor.

Struktur Pengurus Danantara per 24 Februari 2025



Pembina dan Penanggung Jawab

Presiden **Prabowo Subianto**

Dewan Penasehat

- **Susilo Bambang Yudhoyono** (Eks Presiden)
- **Joko Widodo** (Eks Presiden)

Dewan Pengawas

- Ketua Dewan Pengawas: **Erick Thohir** (Menteri BUMN)
- Wakil Ketua Dewan Pengawas: **Muliaman D. Hadad** (Eks Ketua OJK)
- Anggota Dewan Pengawas: **Sri Mulyani** (Menteri Keuangan)
- Anggota Dewan Pengawas: **Tony Blair** (Eks PM Inggris)

Badan Pelaksana

- Kepala Badan Pelaksana/*Chief Executive Officer* (CEO): **Rosan Roeslani** (Menteri Investasi)
- Holding Operasional/*Chief Operating Officer* (COO): **Dony Oskaria** (Wamen BUMN)
- Holding Investasi/*Chief Investment Officer* (CIO): **Pandu Patria Sjahrir** (Belum pernah di pemerintahan, dianggap berpengalaman mengelola investasi)

Pengurus tersebut belum termasuk jajaran manajerial serta Dewan Pengawas kontroversial dari luar negeri yang “dinaturalisasi” ke dalam susunan seperti eks Perdana Menteri Inggris, Tony Blair dan eks Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.

Jika menelusuri struktur organisasi Danantara per Agustus 2025 secara mendalam, persoalan konflik kepentingan dan rangkap jabatan di level *Managing Editor* hingga Penanggung Jawab, semakin terlihat tak terkendali.

Indonesia Corruption Watch menemukan setidaknya 24 dari 31 individu yang menempati struktur organisasi Danantara masuk ke dalam kategori *Politically Exposed Persons* (PEP).

Lalu, setidaknya 7 dari 31 individu yang menempati struktur organisasi Danantara memiliki afiliasi aktif di bidang politik.

Tabel 5. Konflik Kepentingan dan Rangkap Jabatan di Danantara

Nama	Posisi di Danantara	Keterangan Utama
Prabowo Subianto	Penanggung Jawab	Presiden RI, aktif berpolitik, termasuk PEP (Politically Exposed Persons)
Joko Widodo	Dewan Pengarah	Mantan Presiden RI, aktif secara politik, termasuk PEP
Susilo Bambang Yudhoyono	Dewan Pengarah	Mantan Presiden RI, aktif secara politik, termasuk PEP
Erick Thohir	Dewan Pengawas	Menteri BUMN (hingga 27 September 2025), aktif secara politik dan bisnis, termasuk PEP
Muliaman Hadad	Dewan Pengawas	Mantan pejabat OJK, tidak aktif berpolitik, termasuk PEP
Ray Dalio	Dewan Penasihat	Investor global, non-PEP
Helman Sitohang	Dewan Penasihat	Profesional keuangan, non-PEP
Jeffrey Sachs	Dewan Penasihat	Ekonom internasional, termasuk PEP
F. Chapman Taylor	Dewan Penasihat	Arsitek dan konsultan global, non-PEP
Thaksin Shinawatra	Dewan Penasihat	Mantan PM Thailand, aktif berpolitik, termasuk PEP
Rosan Roeslani	CEO	Menteri Investasi/Kepala BKPM, aktif politik dan bisnis, termasuk PEP
Dony Oskaria	COO	Wakil Menteri BUMN (sekarang Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN), aktif berpolitik dan bisnis, termasuk PEP
Pandu Patria Sjahrir	CIO	Pengusaha energi dan keuangan, keponakan Luhut, termasuk PEP
Robertus Bilitea	Managing Director Legal	Profesional hukum, termasuk PEP
Lieng-Seng Wee	Managing Director Risk & Sustainability	Profesional korporasi, non-PEP
Beberapa Managing Director dan Komite lainnya	Berbagai posisi teknis dan manajerial	Mayoritas berasal dari sektor keuangan dan korporasi, non-aktif politik, sebagian termasuk PEP

Lebih dari sekadar PEP, pengurus Danantara juga memiliki rekam jejak yang terindikasi konflik kepentingan. Mereka bahkan bisa mengurus dua kementerian sekaligus. Mereka adalah:

Rosan Roeslani menjadi simbol keterhubungan langsung antara kekuasaan politik dan jaringan bisnis lama. Menjabat sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM sejak Agustus 2024, Rosan memegang kunci utama arus modal dan izin investasi nasional. Ia bukan figur baru: pernah memimpin Kadin, menjadi Duta Besar di Washington, dan lama berkiprah dalam perusahaan keluarga Bakrie, dari Arutmin hingga Bumi Resources. Kini, lewat Recapital Group yang ia dirikan bersama Sandiaga Uno, Rosan memadukan peran negara dan modal swasta dalam satu lingkaran pengaruh yang sulit dipisahkan.





Donny Oskaria, Wakil Menteri BUMN (dan sejak 8 Oktober 2025 diangkat menjadi Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN), mencerminkan sisi lain dari konsolidasi bisnis dan negara. Latar belakangnya di CT Corp dan posisinya sebagai pemegang saham di RANS menunjukkan bagaimana jejaring bisnis hiburan dan media kini masuk dalam orbit kebijakan publik. Keterlibatannya di Pertamina, perusahaan milik negara yang tengah disorot karena kasus korupsi raksasa menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih menjadi titik lemah dalam tata kelola sektor energi negara.

Di lingkaran lain, **Pandu Patria Sjahrir**, keponakanan Luhut Pandjaitan, menjadi penghubung antara dinasti bisnis keluarga dan proyek energi "hijau" yang kini digadang sebagai wajah baru ekonomi nasional. Pandu memegang peran penting di PT TBS Energi Utama Tbk, perusahaan yang dulunya mengandalkan batu bara namun kini merambah ke kendaraan listrik dan digitalisasi. Namun di balik narasi "transisi energi", jejak perusahaan tambang dan konsesi batu bara tetap melekat, memperlihatkan bagaimana oligarki menyesuaikan diri dengan bahasa baru: dari batu bara ke baterai, dari eksploitasi ke elektrifikasi.



Erick Thohir, Menteri BUMN (hingga 17 September 2025) yang juga Ketua Dewan Pengawas, berada di pusat pertemuan antara kekuasaan politik dan jaringan bisnis keluarga. Melalui Mahaka Group dan Trinugraha Thohir (TNT) Group, Erick dan kakaknya, Boy Thohir, menanam pengaruh di sektor media, energi, hingga digital melalui Adaro dan GoTo. Pola ini menegaskan bahwa "reformasi BUMN" bukanlah pemutusan dari kepentingan swasta, melainkan perluasan jejaring ekonomi keluarga ke dalam jantung lembaga negara.

Muliaman D. Hadad, mantan pejabat keuangan yang kini menjadi Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara, memperlihatkan kesinambungan birokrasi lama yang berpadu dengan agenda industri baru. Di satu sisi, ia membawa pengalaman panjang di Bank Indonesia dan OJK; di sisi lain, ia juga terlibat dalam bisnis ekstraksi logam melalui PT Terra Altilium Berdaya, bagian dari rantai pasok global kendaraan listrik. Meski mengusung teknologi "tanpa limbah", keterlibatan pejabat publik dalam industri ekstraktif menimbulkan pertanyaan serius tentang konflik kepentingan.



Sementara **Sri Mulyani**, Menteri Keuangan (hingga 8 September 2025) yang kembali menjabat di era Prabowo, menjadi wajah kesinambungan kebijakan fiskal pro-investor. Dari kebijakan migas hingga insentif kendaraan listrik, arah kebijakan fiskal cenderung memperkuat industri besar alih-alih memperluas keadilan ekonomi. Melalui regulasi baru seperti PMK-12/2025, negara memberi keringanan pajak besar bagi korporasi di bawah retorika "transisi energi".

Kehadiran **Tony Blair** menambah lapisan internasional pada jejaring ini. Mantan Perdana Menteri Inggris itu kini menjadi anggota Dewan Pengawas Danantara sekaligus penasihat proyek Ibu Kota Nusantara. Melalui Tony Blair Institute, ia menjadi jembatan antara pemerintah, BUMN, dan investor global. Namun, sebagaimana masa lalunya di Irak, perannya kembali mengundang pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang diuntungkan dari proyek "pembangunan hijau" ini, rakyat atau kapital global?

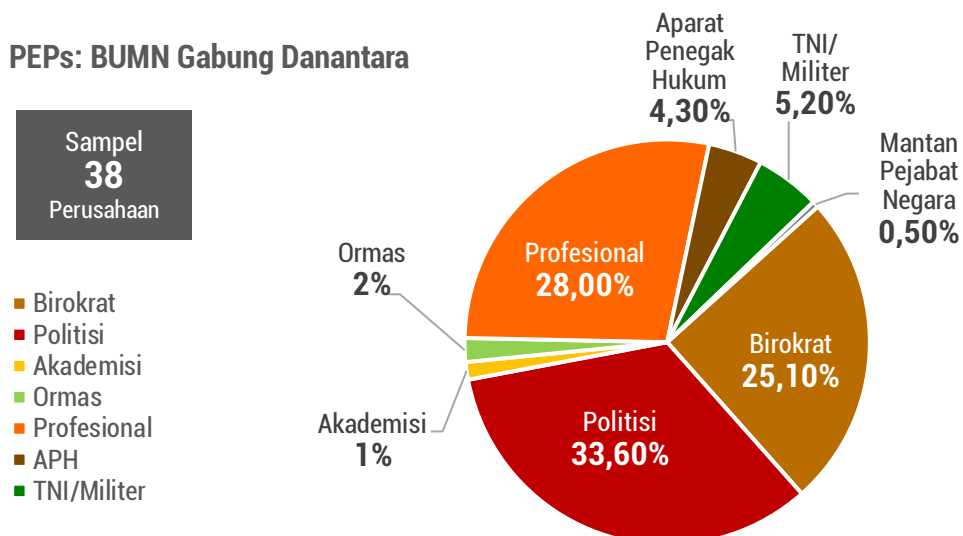


Risiko Korupsi dan Patronase Politik di BUMN yang Tergabung di Danantara

Sejak diluncurkan pada Februari 2025 Danantara mengkonsolidasikan tujuh BUMN dengan kondisi keuangan yang relatif sehat. Akrobat ini membahayakan. Sebab, sebagian besar pengurusnya merangkap jabatan menteri, wakil menteri, dan memiliki lini bisnis raksasa di sektor swasta. Akibatnya, risiko korupsi yang besar mengancam badan investasi yang kini mulai mengurus aset dan dividen BUMN. Padahal dividen tujuh BUMN anggota awal Danantara, merujuk pada Laporan Keuangan Gabungan BUMN tahun 2023, menyumbang 89,63% dari total dividen yang disetor ke APBN.

Apabila tak terdapat upaya untuk menghentikan Danantara, yang terlihat tergesa-gesa dibentuk, risiko guncangan moneter menjadi besar. Terlebih, kembali merujuk pada data latar belakang komisaris BUMN yang tergabung ke Danantara, jumlah politikus melampaui proporsi profesional dan birokrat.

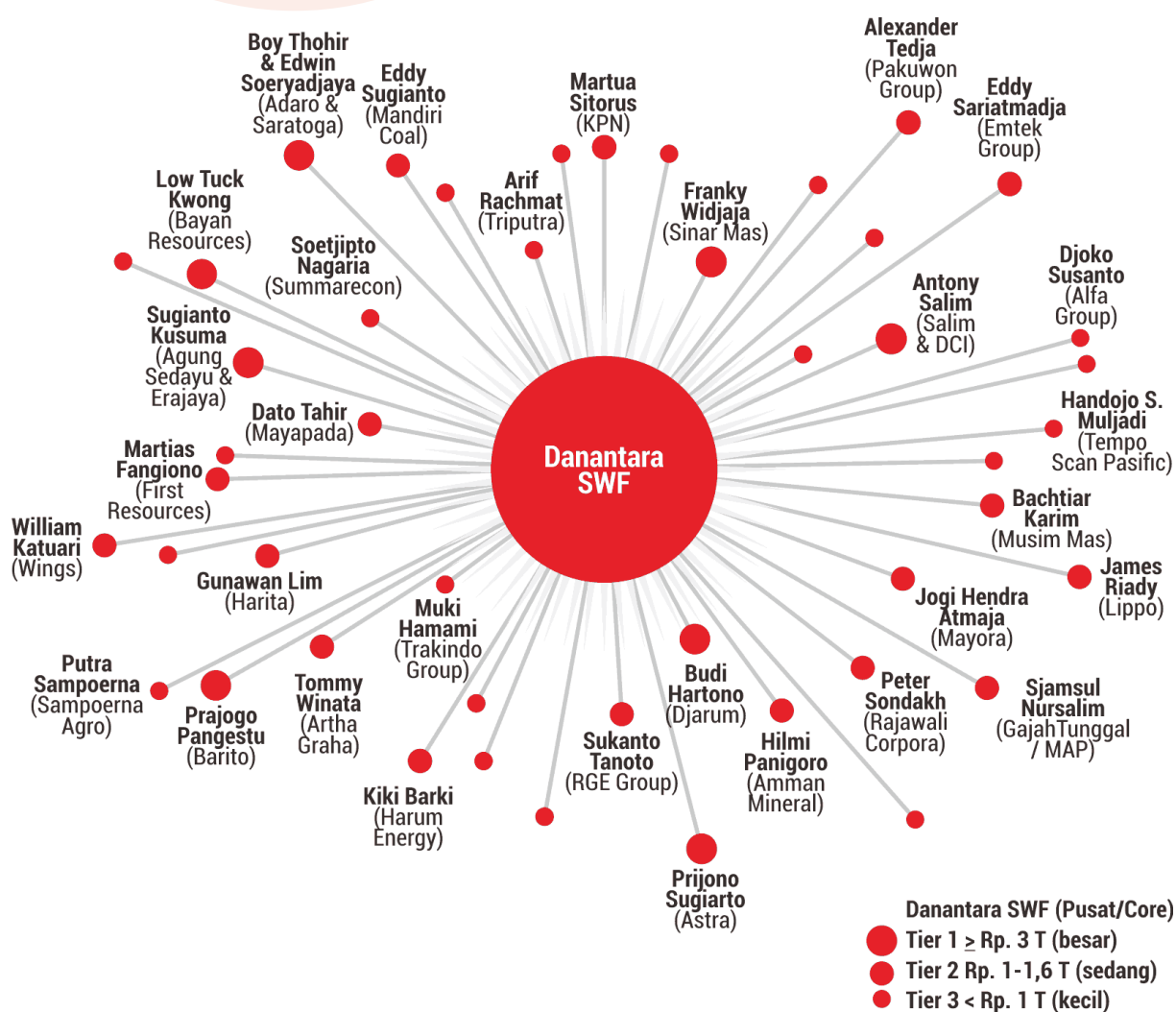
Ilustrasi 7. PEPs: BUMN Gabung Danantara



Berdasarkan sampel tujuh induk usaha BUMN dan 31 entitas anak yang mulai dikonsolidasikan ke Danantara, dapat disimpulkan bahwa selain risiko korupsi yang tinggi bercokol pada pengurus utama, risiko sama juga berada di kursi-kursi komisaris BUMN yang tergabung ke Danantara. Komisaris berlatar belakang politisi memimpin dengan persentase 33,6%, diikuti kalangan profesional sebesar 28% dan birokrat (25,1%). Selain itu, ada pula nama-nama yang berlatar belakang militer (5,2%) dan Aparat Penegak Hukum (4,3%).



Patriot Bonds sebagai Politik Jatah Preman & Proyek-Proyek Didanai Danantara



Tabel 6. Pengusaha Pembeli Patriot Bonds

No	Nama	Perusahaan	(Triliun Rp)
1	Antony Salim	Salim & DCI	3
2	Prajogo Pangestu	Barito	3
3	Sugianto Kusuma	Agung Sedayu & Erajaya	3
4	Franky Widjaja	Sinar Mas	3
5	Boy Thohir, Edwin Soeryadjaya	Adaro & Saratoga	3
6	Budi Hartono	Djarum	3
7	Prijono Sugiarto	Astra	3
8	Low Tuck Kwong	Bayan Resources	3
9	Tommy Winata	Artha Graha	1,6
10	James Riady	Lippo	1,5
11	Hilmi Panigoro	Amman Mineral	1,5
12	Gunawan Lim	Harita	1,5
13	Eddy Sariaatmadja	Emtek Group	1,5
14	Sukanto Tanoto	RGE Group	1,5
15	Sjamsul Nursalim	Gajah Tunggal/MAP	1,5
16	William Katuari	Wings	1,1
17	Alexander Tedja	Pakuwon Group	1,1
18	Dato Tahir	Mayapada	1
19	Martua Sitorus	KPN	1
20	Martias	First Resources	1
21	Peter Sondakh	Rajawali Corpora	1
22	Eddy Sugianto	Mandiri Coal	1
23	Kiki Barkri	Harum Energy	1
24	Bachtiar Karim	Musim Mas	1
25	Jogi Hendra Atmadja	Mayora	1
26	Djoko Susanto	Alfa Group	0,8
27	Arif Rachmat	Triputra	0,75
28	Soetjipto Nagaria	Summarecon	0,55
29	Putra Sampoerna	Sampoerna Agro	0,5
30	Muki Hamami	Trakindo Group	0,5
31	Handojo S. Muljadi	Tempo Scan Pacific	0,5
32	Arsjad Rasyid	Indika Energy	0,3
33	Harun Hajadi	Ciputra Group	0,3
34	Mucki Tan	Rodamas Group	0,3
35	Widarto Oey	Sungai Budi Group	0,3
36	Chandy Kusuma	FKS Group	0,3
37	Kuncoro Wibowo	Kawan Lama Group	0,3
38	Husodo Angkosubroto	Gunung Sewu	0,3

39	Sudhamek	Garudafood	0,3
40	Chearavanont	Charoen Pokphand	0,3
41	Soedomo Mergonoto	Kapal Api Group	0,275
42	Renaldo Santosa	Japfa	0,275
43	Haryanto Adikoesoemo	AKR	0,25
44	Rukun Rahardja Group	Rukun Rahardja Group	0,2
45	Nurhayati Subakat	Paragon	0,1
46	Marcel Menaro	Meratus Line	0,1

Sumber: Dihimpun dari berbagai sumber media.

Danantara, *sovereign wealth fund* bentukan pemerintahan Prabowo, menerbitkan obligasi sebesar Rp50 triliun dengan tenor 5-7 tahun dan kupon hanya 2%, jauh di bawah rata-rata obligasi pemerintah (sekitar 6%). Media analisis Yosefardi³⁹ menilai instrumen ini tidak lebih dari obligasi biasa, tetapi dibungkus dengan label nasionalistik agar para konglomerat merasa “terpanggil” atau “dipaksa” menjadi *patriot investors*. Sejumlah ekonom menyebutnya sebagai bentuk “uang perlindungan atau investasi pemerasan” karena tekanan sosial-politik untuk ikut serta sangat tinggi.

Daftar 46 pembeli yang beredar pada 19 September 2025 menunjukkan nilai partisipasi Rp51,75 triliun, melampaui target penerbitan.⁴⁰⁴¹ Setidaknya terbagi dalam tiga lapis:

- **Tier 1 (Rp3 T):** Anthony Salim, Prajogo Pangestu, Franky Widjaja, Sugianto Kusuma, Boy Thohir, Low Tuck Kwong, Astra Group.
- **Tier 2 (Rp1-1,6 T):** James Riady, Tommy Winata, Gunawan Lim, Peter Sondakh, Sukanto Tanoto, William Katuari, Eddy Sariaatmadja, Martua Sitorus, Martias, Kiki Barki, Alexander Tedja, Jogi Hendra Atmadja, Tahir, Bachtiar Karim, Sjamsul Nursalim.
- **Tier 3 (Kurang dari Rp1 T):** Djoko Susanto, Arif Rachmat, Renaldo Santosa, Haryanto Adikoesoemo, Soetjipto Nagaria, serta Indika Energy (Arsjad Rasyid) dan Rukun Raharja (Hapsoro, menantu Megawati).

Banyak konglomerat ikut bukan karena prospek finansial, tetapi untuk membeli “asuransi politik” yaitu mengamankan bisnis, perizinan, atau kasus hukum. Sebagai contoh adalah Bachtiar Karim (Musim Mas) tengah menghadapi denda Rp4,5 T atas kasus korupsi ekspor sawit dan Sjamsul Nursalim (Gajah Tunggal) baru lepas dari status buronan setelah KPK mengeluarkan SP3. Sejumlah pelaku pasar menilai partisipasi ini juga dimanfaatkan untuk bernegosiasi dengan pemerintah, misalnya menahan isu pengambilalihan BCA dari keluarga Hartono setelah mereka membeli obligasi.

Program ini terindikasi sebagai tekanan dan pemerasan halus yang juga dikenal sebagai “politik jatah preman”. Mekanisme ini mengingatkan pada praktik era Soeharto-mobilisasi dana elite bisnis untuk menopang rezim, bukan efisiensi ekonomi. Analisis memperingatkan efek *crowding out* (penyerapan likuiditas dari pasar obligasi lain) dan kemungkinan risiko tata kelola serius, mirip skandal 1MDB.

³⁹ Danantara's 'Patriot Bonds' (2), 27 Agustus 2025, [Yosefardi](#). Dikutip 24 Oktober 2025.

⁴⁰ Respons Danantara soal Viral Daftar 46 Konglomerat Beli Patriot Bond, [CNN Indonesia](#), 1 Oktober 2025. Dikutip pada 17 Oktober 2025.

⁴¹ Adventy, Artha, Ramai Daftar Konglomerat Pembeli Patriot Bond, Nama CT-HT Absen, [Bloombergtechnoz.com](#), 2 Oktober 2025. Dikutip 17 Oktober 2025.

Dua seri obligasi 'Patriot Bonds' yang diterbitkan pada 24 Oktober 2025 tersebut, diklaim terserap penuh oleh pasar. Pemerintah mengklaim kehadiran partisipasi sejumlah konglomerat besar seperti HM Sampoerna, yang merogoh kocek hingga Rp 500 miliar untuk memborong dua seri obligasi tersebut, merupakan sinyal positif terhadap keberadaan Patriot Bond. Pemerintah melabelinya sebagai bentuk patriotisme ekonomi, sedangkan sejumlah analis menilai narasi ultranasionalistik ini justru menutupi tekanan sosial-politik yang menyertai proses transaksi Patriot Bond.

Di tengah 'euforia' *oversubscription* Patriot Bond -- kondisi di mana permintaan investor melampaui jumlah yang ditawarkan -- pasar saham justru bergerak negatif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun lebih dari 2%. Beberapa *fund manager* membaca gejolak ini sebagai sinyal kegelisahan investor terhadap intervensi politik dalam ruang investasi. Artinya, pasar menilai penerbitan Patriot Bond sebagai sentimen negatif.

Kekhawatiran lainnya yang diungkap oleh *fund manager* adalah, upaya memompa indeks secara artifisial dengan memanipulasi pergerakan saham-saham gorengan. Langkah ini berpotensi besar dilakukan untuk menjaga ilusi stabilitas pasar modal di tengah ketidakpastian arah kebijakan ekonomi.

Dari sisi politik, keterlibatan hampir semua konglomerat besar—termasuk yang sebelumnya dekat dengan pemerintahan Jokowi maupun oposisi PDIP—mengukuhkan Prabowo sebagai pusat loyalitas ekonomi baru. Absennya grup Bakrie, CT Corp, dan Kalla dari daftar pembeli Patriot Bonds menandai batas jejaring antara oligarki lama dan konfigurasi kekuasaan ekonomi yang sedang dibentuk. Bagi pasar, ini bukan sekadar pergeseran kekuasaan, tapi juga potensi ketidakpastian arah kebijakan ekonomi ke depan.

Dengan demikian Patriot Bonds bukan instrumen keuangan inovatif, melainkan mekanisme politik-ekonomi untuk konsolidasi kekuasaan dan kontrol elite bisnis. Antara lain sebagai alat tekanan (*blackmail fund*) yaitu partisipasi menjadi ukuran loyalitas konglomerat terhadap rezim. Kemudian terdapat Risiko tata kelola tinggi mencakup transparansi rendah, potensi konflik kepentingan, dan peluang *quid pro quo* hukum-bisnis. Paling penting juga sebagai simbol transisi kekuasaan ekonomi dari model "pembangunan Jokowi-IKN" menuju "patriotisme modal" era Prabowo.

Dengan total lebih dari Rp50 triliun dana oligarki terserap, program ini menunjukkan bagaimana nasionalisme ekonomi bisa berubah menjadi politik patronase finansial skala besar.

Danantara akan memakai dana dari Patriot Bonds tersebut antara lain untuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA/*waste to energy*) yang akan dikembangkan ke 33 provinsi dengan dimulai dari 6 proyek terlebih dahulu di Jakarta, Bali, Semarang, Makassar, hingga Bandung. Konsep PLTSA sebagai langkah transisi energi merupakan kesalahan logika, sebab konsep utama pengelolaan sampah adalah mengurangi, bukan menambah sampah terus-menerus untuk menjadi sumber utama pembangkit listrik. Pemerintah juga harus belajar dari proyek PLTSA di Solo di mana kemampuan operasional sampah jauh di bawah target yaitu berkisar 20%.⁴² Belum ditambah fakta lain yaitu hanya 2 PLTSA yang beroperasi dari 12 PLTSA⁴³.

⁴² Mulato, TPA Putri Cempa Overload, PLTSA Belum Maksimal, [BRI](#), 19 Maret 2025. Dikutip 19 Oktober 2025.

⁴³ Komalasari, Tia Dwitiani, Mayoritas Proyek PLTSA di Indonesia Mangkrak, Hanya Dua yang Beroperasi, [Katadata](#), 13 Maret 2025. Dikutip 19 Oktober 2025.

Proyek PLTSa memicu dugaan perburuan rente dari perusahaan yang menjalankan proyek. Sebagai contoh grup perusahaan terafiliasi dengan Luhut Panjaitan yaitu PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mulai fokus ke pengelolaan sampah setelah mengakuisisi perusahaan asal Singapura yaitu Sembcorp. Di kalangan jurnalis beredar kabar bahwa TOBA akan bekerja sama dengan grup dari Chandra Asri yaitu konglomerasi Prajogo Pangestu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan untuk menggarap proyek sampah ke energi ini⁴⁴.

Dalam konteks pendanaan untuk ekspansi proyek, dana Patriot Bonds sangat mungkin untuk digunakan pada proyek lain. Sebagai contoh Danantara juga melakukan investasi ke proyek chlor-alkali Chandra Asri bersama Indonesia Investment Authority (INA) \$800 juta sebesar Rp13,02 triliun⁴⁵. Hal inilah yang perlu diawasi di masa depan dalam konteks investasi dan Patriot Bonds, sebab upaya untuk membajak lembaga investasi milik publik untuk kepentingan elite telah muncul gejala-gejalanya.

Dengan melihat segala kekacauan tersebut, maka hal ini menunjukkan Danantara dibuat dan diimplementasikan dalam bayangan cengkeraman kepentingan presiden yang ingin melakukan *micro-manage* terhadap aset dan uang negara.

Untuk memastikan Asta Cita berjalan, Danantara sudah dalam jalurnya. Namun pertanyaannya adalah ini semua untuk siapa? Mulai dari pembahasan UU BUMN superkilat, pengurus terlibat konflik kepentingan, dan jejak dalam perang berlumur darah, sumber dana dengan cara-cara "preman", serta potensi korupsi membayangi, tampaknya sudah jelas akan menjadi apa Danantara di masa depan.

Prabowo sukses menjadikan Danantara untuk jadi bancakan. Prabowo sukses merencanakan kegagalan Danantara untuk menjadi instrumen kesejahteraan rakyat alih-alih menjadikannya alat kesejahteraan kroni, elite, dan lingkaran kekuasaan. Tinggal menunggu waktu, kegagalan itu akan menjadi harimau yang memangsa tuannya sendiri.



⁴⁴ Respons Toba Soal Isu Kongsi Pengelolaan Sampah Dengan CDIA, [Bloombergtechnoz](#), 12 September 2025. Dikutip 19 Oktober 2025.

⁴⁵ Fauzan, Ahmad Muzdaffar, Danantara-INA Investasi Rp13 triliun Di Pabrik Petrokimia Chandra Asri, [Antara](#), 17 Juni 2025. Dikutip 19 Oktober 2025.

Situasi Politik Kabinet: Pembagian Kue Kekuasaan dan Ekonomi

Jejak Balas Budi dan Ekstraktivisme Pembantu Presiden

Sehari setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo mengumumkan susunan kabinet berisi 48 menteri, 56 wakil menteri, enam kepala badan/lembaga setingkat kementerian, tujuh utusan khusus, enam penasihat khusus, serta satu staf khusus presiden. Sejumlah lembaga teknis baru juga muncul, seperti Badan Penyelenggara Haji, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Aroma balas budi dan bagi-bagi jatah kekuasaan di antara partai politik pengusung Prabowo-Gibran menguar. Berdasarkan penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) per 8 September 2025 saja, sedikitnya terdapat 42 dari 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang secara terang merangkap jabatan dengan posisi yang dilarang oleh Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangannya di putusan No. 80/PUU-XVII/2019 dan pada putusan No. 183/PUU-XXII/2024.

Paska larangan rangkap jabatan wakil menteri dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XXIII/2025 pun, tidak nampak ada upaya koreksi dari Prabowo. Justru sebaliknya, melalui empat kali kocok ulang (*reshuffle*) kabinet pasca putusan tersebut, beberapa posisi justru dibuat sengaja menjadi rangkap jabatan dengan posisi lain untuk anggota kabinet di tingkat menteri dan wakil menteri.

Komposisi dari kabinet yang disusun oleh Prabowo juga menampakkan wajah kartelisasi politik yang semakin menebal. Selain jauh dari pertimbangan meritokrasi, individu-individu yang diajak bergabung ke dalam kabinet dimaksudkan agar tunduk pada koalisi payung tanpa oposisi bermakna. Dengan pembentukan kabinet tergemuk sepanjang sejarah Indonesia pasca Orde Baru, anggaran publik menjadi korbannya.

Rekam jejak dari individu yang ditunjuk dalam kabinet juga sama sekali tidak dipertimbangkan. Sebagai contoh, ICW menyoroti sejumlah nama yang terhubung dengan kasus korupsi. Baik yang berstatus sebagai saksi, disebut namanya dalam fakta persidangan, hingga yang pernah menyangang status tersangka kasus korupsi. Nama-nama tersebut di antaranya:⁴⁶

- Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto;
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra;
- Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo; dan
- Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

⁴⁶ Siaran Pers ICW 24 Oktober 2024, "Kabinet Prabowo-Gibran Tak Cerminkan Keberpihakan Pemberantasan Korupsi" Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/kabinet-prabowo-gibran-tak-cerminkan-keberpihakan-pemberantasan-korupsi/>.

Tabel 7. Wakil Menteri Rangkap Jabatan Lain

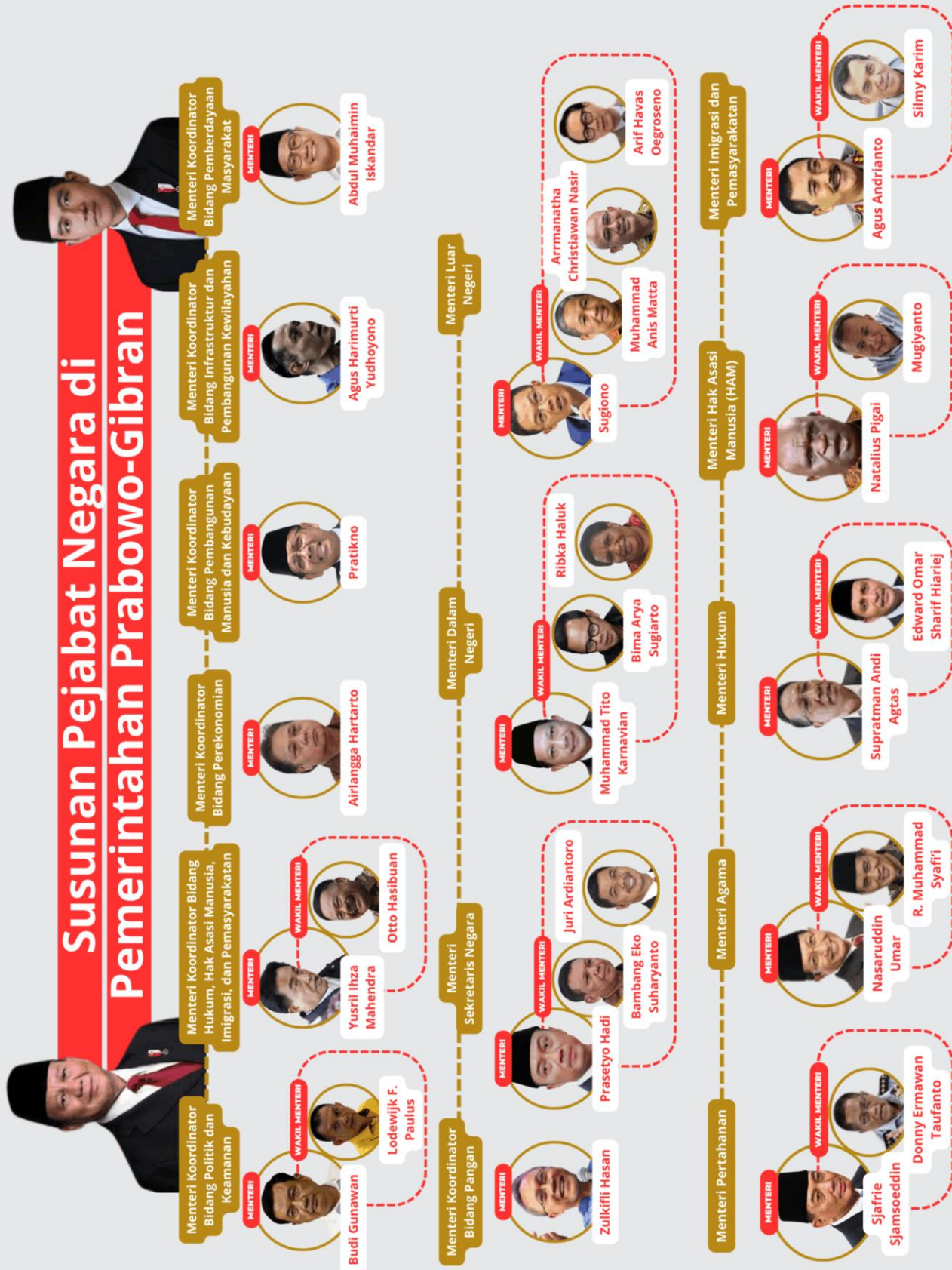
No	Kementerian	Nama Wakil Menteri	Jabatan di BUMN
1	BUMN	Dony Oskaria	Wakil Komisaris Utama PT Pertamina
2	BUMN	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama BRI
3	BUMN	Aminuddin Ma'ruf	Komisaris PT PLN
4	Keuangan	Suahasil Nazara	Wakil Komisaris Utama PT PLN
5	Perhubungan	Suntana	Wakil Komisaris Utama PT Pelindo
6	UMKM	Helvi Yuni Moraza	Komisaris BRI
7	Pertanian	Sudaryono	Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
8	ESDM	Yuliot Tanjung	Komisaris Bank Mandiri
9	Perumahan & Kawasan Permukiman	Fahri Hamzah	Komisaris BTN
10	Pekerjaan Umum	Diana Kusumastuti	Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
11	Komunikasi dan Digital	Angga Raka Prabowo	Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
12	Desa dan PDT	Ahmad Riza Patria	Komisaris PT Telkomsel
13	Komunikasi & Digital	Nezar Patria	Komisaris Utama PT Indosat
14	Lingkungan Hidup	Diaz Hendropriyono	Komisaris Utama PT Telkomsel
15	Imigrasi dan Pemasarakatan	Silmy Karim	Komisaris PT Telkom Indonesia
16	Kebudayaan	Giring Ganesha	Komisaris PT GMF AeroAsia
17	Pertahanan	Donny Ermawan Taufanto	Komisaris Utama PT Dahana
18	Pemberdayaan Perempuan & Anak	Veronica Tan	Komisaris PT Citilink Indonesia
19	Kependudukan dan Keluarga	Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka	Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi
20	Perdagangan	Dyah Roro Esti Widya Putri	Komisaris Utama PT Sarinah
21	Investasi dan Hilirisasi	Todotua Pasaribu	Wakil Komisaris Utama PT Pertamina
22	Agraria dan Tata Ruang	Ossy Dermawan	Komisaris PT Telkom
23	Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi	Stella Christie	Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
24	Pemuda dan Olahraga	Taufik Hidayat	Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
25	Luar Negeri	Arif Havas Oegroseno	Komisaris PT Pertamina International Shipping
26	Koperasi	Ferry Joko Julianoro	Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

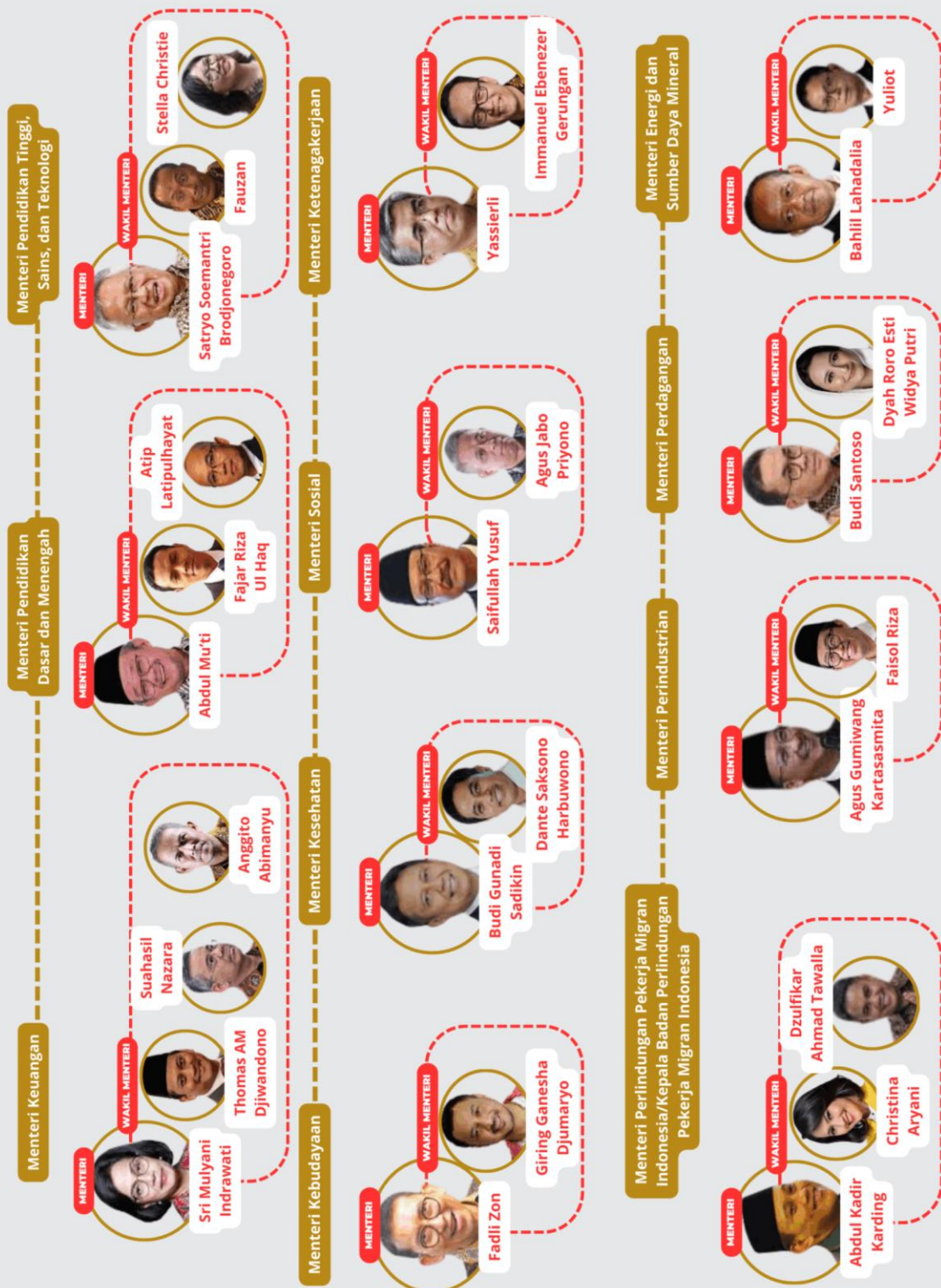
27	Kesehatan	Dante Saksono Harbuwono	Komisaris PT Pertamina Bina Medika
28	Kelautan dan Perikanan	Didit Herdiawan Ashaf	Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
29	Perlindungan Pekerja Migran	Christina Aryani	Komisaris PT Semen Indonesia
30	Sekretaris Negara	Juri Ardiantoro	Komisaris Utama PT Jasa Marga
31	Sekretaris Negara	Bambang Eko Suhariyanto	Komisaris PT PLN
32	Hukum	Edward Omar Sharif Hiariej	Komisaris PT Perusahaan Gas Negara
33	HAM	Mugiyanto	Komisaris Utama PT Integrasi Aviasi Solusi
34	Kantor Staf Presiden	Muhammad Qodari	Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
35	Ekonomi Kreatif	Irene Umar	Komisaris PT Pertamina Gas
36	PANRB	Purwadi Arianto	Komisaris Utama PT Elnusa
37	Transmigrasi Indonesia	Viva Yoga Mauladi	Komisaris PT Petrokimia Gresik
38	Perindustrian	Faisol Riza	Komisaris Utama Pertamina Gas
39	Luar Negeri	Arrmanatha Nasir	Komisaris PT PLN Indonesia Power
40	Koordinator Politik dan Keamanan	Lodewijk F. Paulus	Komisaris PT ESSA Industries Indonesia (swasta)

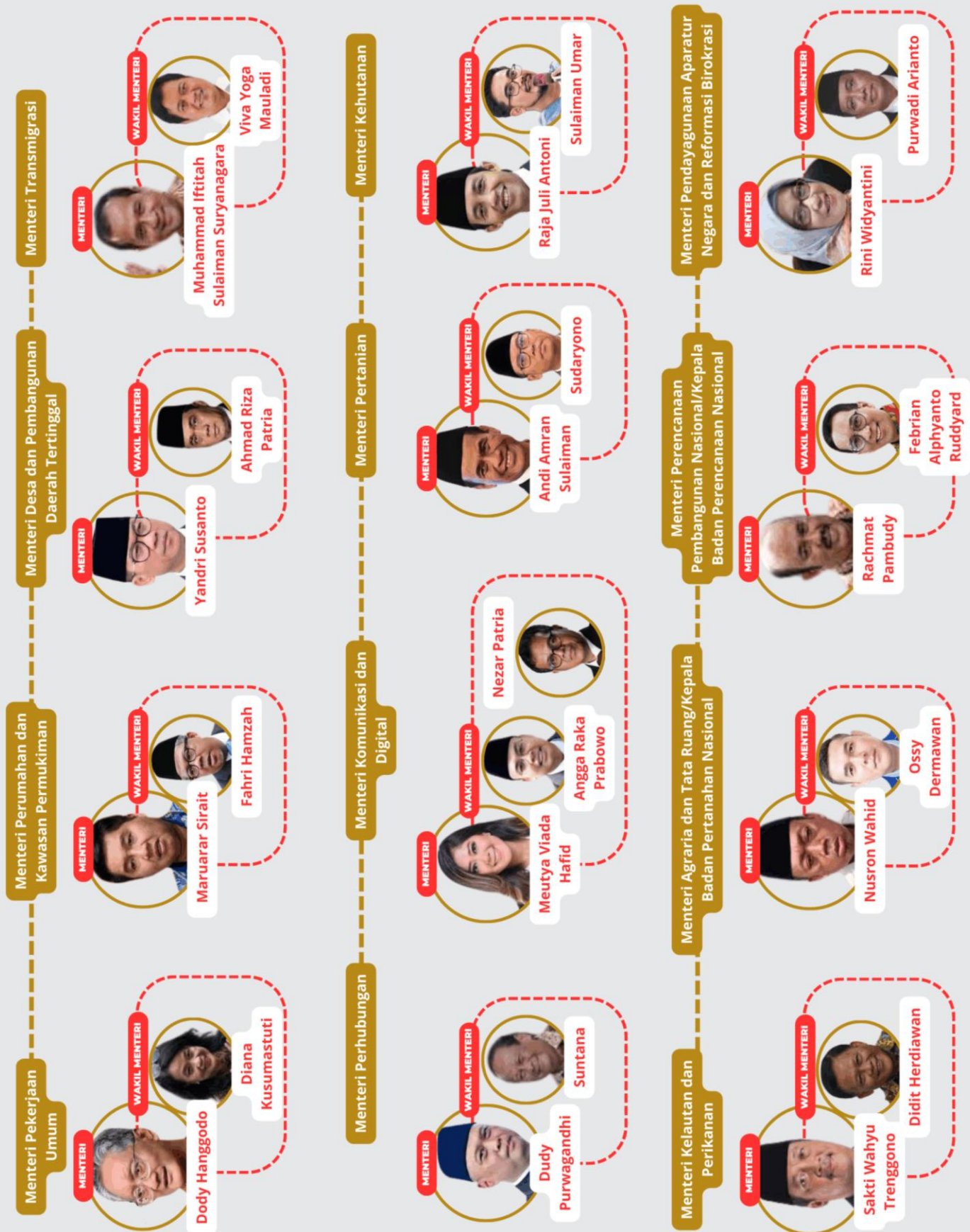
Pola pemilihan kabinet yang ugal-ugalan ini membuahkan hasil. Belum satu tahun menjabat, anggota kabinet pertama di pemerintahan Prabowo-Gibran yang tersandung kasus korupsi adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ia tersangkut Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bulan Agustus 2025 atas dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Ebenezer diberi jatah Wakil Menteri karena perannya dalam Pemilu 2024 sebagai pendiri kelompok relawan yang secara aktif mendukung baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto.

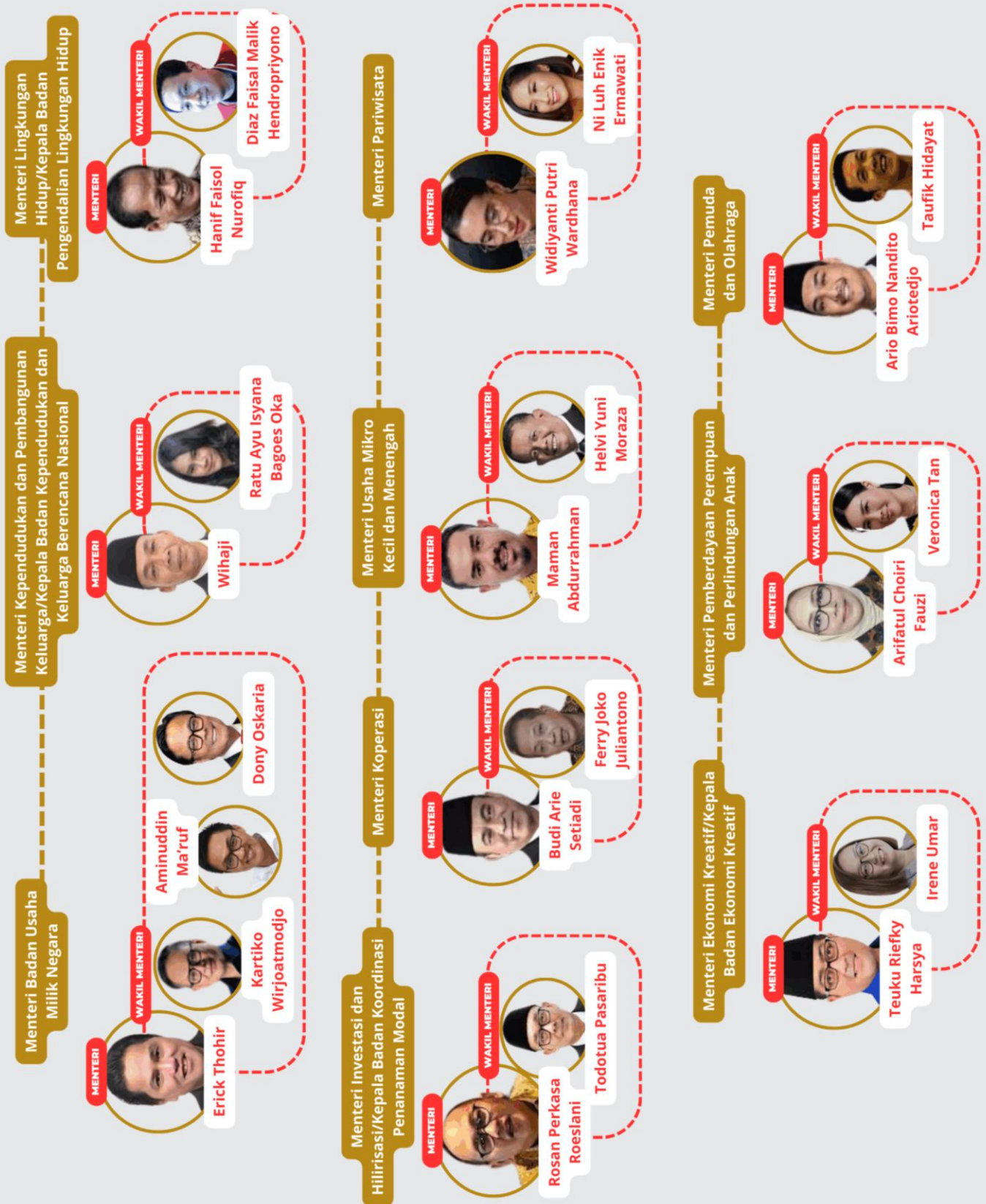
Tabel 8. Wakil Menteri Rangkap Jabatan BUMN dan Kasus Khusus Lain

No	Kementerian	Nama Wakil Menteri	Jabatan di BUMN	Keterangan
1	Ketenagakerjaan	Immanuel Ebenezer	Komisaris PT Pupuk Indonesia	Dicopot dari jabatan (22 Agustus 2025)
2	Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi & Pemasarakatan	Otto Hasibuan	Ketua Umum PERADI	Melanggar Putusan MK No. 183/PUU-XXII/2024









Susunan Kabinet Pasca-pelantikan

Selain itu, 20 menteri dan 14 wakil menteri merupakan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, baik sebagai dewan pengarah, penasihat, pakar, maupun anggota struktur strategis. Total 34 anggota TKN kini menduduki kursi menteri dan wakil menteri, sementara enam lainnya menempati posisi di lembaga non-kementerian dan badan khusus di bawah presiden. Di luar itu, terdapat enam anggota TKN yang mendapatkan posisi di dalam formasi Utusan Khusus Presiden, Badan Penyelenggara Haji, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata sekaligus istri Wakil Ketua TKN Wisnu Wardhana, menggambarkan bagaimana jejaring personal dan politik TKN terinstitusionalisasi di pemerintahan.

Aroma ekstraktivisme langsung menyeruak dalam susunan kabinet pertama. Nama-nama seperti Bahlil Lahadalia, dengan rekam jejak di bisnis nikel, dan Airlangga Hartarto di bisnis pertambangan zirkon dan merupakan orang di balik layar PT Multi Harapan Utama, menjadi contoh utama. PT Mutli Harapan Utama disebut terkait terdakwa korupsi timah Harvey Moeis serta memiliki catatan buruk akibat lumbang tambang yang menghilangkan nyawa seorang remaja di Kalimantan Timur.



Reshuffle demi Reshuffle yang Memperkuat Ambisi Ekstraktif Rezim Prabowo-Gibran

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melakukan beberapa kali reshuffle kabinet sejak dilantik pada Oktober 2024. Reshuffle terbaru pada 8 Oktober 2025 melibatkan dua menteri baru dan tiga wakil menteri.

Reshuffle 19 Februari 2025



Brian Yulianto dilantik menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Ia adalah akademisi dan peneliti di bidang teknologi material dan energi, yang sebelumnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia menempuh pendidikan di ITB dan Universitas Tokyo, serta menjabat sebagai Kepala Badan Industri Mineral pada Agustus 2025, lembaga baru yang mengintegrasikan riset teknologi dalam industri tambang dan hilirisasi mineral. Penunjukan ini menempatkan Brian di jantung pengambilan keputusan terkait transformasi industri ekstraktif menuju model yang lebih berbasis teknologi dan efisiensi energi.

Sebelum menjabat sebagai menteri, Brian aktif dalam berbagai forum riset dan kebijakan, termasuk sebagai penasihat teknis untuk proyek-proyek energi bersih dan pengembangan material strategis, serta turut menyusun *roadmap* nasional untuk transisi energi dan penguatan kapasitas riset perguruan tinggi. Dengan latar akademik yang kuat di bidang energi dan keterlibatan dalam industri mineral, penunjukannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bukan sekadar langkah teknokratis, melainkan bagian dari arsitektur kekuasaan yang menempatkannya sebagai simpul strategis antara riset, industri, dan kebijakan.

Melalui posisinya, Brian mengendalikan arah kebijakan riset nasional, pendanaan inovasi, dan integrasi teknologi dalam proyek-proyek strategis negara, yang kelak ditujukan untuk mendukung hilirisasi mineral seperti arah kebijakan pembangunan rezim ekstraktif Prabowo-Gibran. Karena itu, kehadiran Brian dalam komposisi pembantu Presiden dapat dimaknai sebagai upaya pelanggaran eksploitasi yang menyaru dalam wujud teknokrasi pemerintahan.

Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ia dikenal sebagai ekonom teknokrat dan mantan Ketua Dewan Komisiner LPS (2020-2025). Jejak karirnya memperlihatkan keterlibatan panjang dalam industri ekstraktif. Purbaya pernah bekerja di Schlumberger Overseas SA (1989-1994), perusahaan jasa eksplorasi migas global. Ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada 2017, cikal bakal holding BUMN tambang MIND ID yang menaungi ANTAM, PT Timah, PT Bukit Asam, dan Freeport Indonesia.

Pembentukan holding industri pertambangan melalui Inalum terjadi pada 2017, saat Purbaya menjabat sebagai Komisaris. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Maritim dan Investasi, sebuah posisi strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan investasi energi. Pada 2019, holding ini bertransformasi menjadi MIND ID (Mining Industry Indonesia), dengan Inalum diposisikan sejajar dengan anak usaha lainnya, menandai konsolidasi negara atas industri ekstraktif melalui struktur korporasi.

Dengan latar belakang ekstraktivisme yang kental, penunjukan Purbaya sebagai Menteri Keuangan tak bisa dibaca sekadar sebagai langkah teknokratis. Ia merepresentasikan arsitektur kekuasaan yang menjadikan eksploitasi sumber daya sebagai fondasi fiskal negara. Kini, ia mengelola arus utang, pembiayaan transisi energi, dan skema fiskal yang bersinggungan langsung dengan proyek-proyek ekstraktif. Kehadirannya mempertegas bahwa teknokrasi dapat menjadi instrumen politik untuk melanggengkan eksploitasi. Di bawah rezim yang menjadikan sumber daya alam sebagai mesin pendapatan, kebijakan rasional justru berpotensi menjadi kedok bagi teknopolitik yang memperkuat kuasa ekonomi ekstraktif.



Tabel 9. Komposisi kepemilikan saham MIND ID

Entitas	Persentase Kepemilikan Saham
ANTAM	65,00%
Bukit Asam	65,93%
Freeport Indonesia	51,23%
Inalum	100,00%
Timah	65,00%
Vale	34,00%
MIND ID Trading	100,00%

Sumber: Diolah dari website MIND ID



Ferry Juliantono dilantik sebagai Menteri Koperasi dan UKM, menggantikan teten Masduki. Loyalis lama Prabowo Subianto ini dikenal aktif di Partai Gerindra dan pernah menjabat Wakil Ketua Umum, serta terlibat dalam tim kampanye Prabowo sejak 2014. Sebelum menjadi menteri, Ferry sempat menjabat Wakil Menteri Koperasi dan UKM serta Koordinator Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, program yang mengintegrasikan koperasi desa dengan agenda pembangunan nasional. Meski diklaim mendorong ekonomi lokal, program ini juga membuka ruang bagi penetrasi modal dan pengaruh politik hingga tingkat desa.

Posisi Ferry kini semakin strategis seiring revisi UU Minerba (Nomor 4/2009 menjadi UU Minerba 2/2025) dan terbitnya PP 39/2025, yang memberi legalitas bagi koperasi dan UMKM untuk terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan. Regulasi ini memperluas definisi pelaku usaha tambang serta memprioritaskan pemberian WIUP dan WIUPK kepada koperasi, UMKM, badan usaha milik organisasi keagamaan, dan perguruan tinggi. Melalui PP 39/2025, koperasi dan UMKM bahkan dapat mengakses izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) dan bermitra di wilayah tambang milik perusahaan besar.

Peran Ferry Juliantono sebagai loyalis Prabowo menjadi krusial dalam hal ini. Sebab, ia menjadi penghubung utama antara regulasi, jaringan politik, dan penetrasi modal kepada UMKM dan koperasi untuk menambang. Sehingga, kehadiran Ferry merupakan gelagat saluran baru bagi ekspansi industri ekstraktif ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh korporasi besar.

Mochamad Irfan Yusuf atau **Gus Irfan** dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah Indonesia pada 8 September 2025, setelah transformasi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian penuh. Ia dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dengan latar belakang pesantren, politik, dan ekonomi syariah. Sebagai cucu KH Bisri Syansuri—pendiri NU—kiprahnya berakar dalam jaringan keagamaan yang berpengaruh, menjadikan penunjukannya bukan sekadar langkah administratif, melainkan strategi politik yang memperkuat posisi NU dalam struktur kekuasaan. Kehadirannya berpotensi menjadi legitimasi religius bagi kebijakan ekstraktif, di mana agama berfungsi sebagai kanal baru bagi distribusi proyek dan kekuasaan negara.

Lebih jauh, penunjukan ini tak terlepas dari kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi tambang kepada organisasi keagamaan, termasuk NU, melalui skema prioritas WIUP dalam UU No. 2 Tahun 2025 dan PP No. 39 Tahun 2025. Melalui kebijakan tersebut, NU kini bertransformasi dari lembaga dakwah dan pendidikan menjadi entitas bisnis pengelola sumber daya alam.

Pemberian konsesi tambang kepada NU yang diklaim sebagai pemberdayaan organisasi keagamaan, menjadi titik balik penting dalam relasi antara negara, agama, dan industri ekstraktif. Ketika organisasi keagamaan seperti NU menerima konsesi tambang, dan tokoh-tokohnya menduduki posisi strategis dalam kabinet, maka konteks pelayanan ibadah tidak lagi steril dari kepentingan ekonomi-politik.



BUMN sebagai Ruang Politik Kekuasaan

Bukan suatu fenomena baru Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi “sapi perah” politik bagi kekuasaan yang dominan. Di bawah Rezim Orde Baru, Perusahaan Minyak Negara (Pertamina) menjadi arena patronase politik dan korupsi. Peran Pertamina berubah fungsi dari sebelumnya sekadar entitas komersial, berubah menjadi badan usaha yang lihai memasukkan banyak perusahaan lokal dan asing ke industri dan gas domestik. Tidak jarang, skema kontrak atau patungan antara berbagai perusahaan saat itu, mendulang keuntungan tersendiri bagi “Sutowo (Direktur Pertamina), koneksi militer ataupun Presiden Suharto secara langsung” (Goldstone, 1977, p. 127).

Paska Orde Baru, tidak ada perubahan yang signifikan di tubuh BUMN, meskipun terjadi akuisisi saham Freeport sebesar 51% oleh negara pada 2018. Namun, akuisisi itu tidak disandarkan pada usaha mengedepankan keuntungan, melainkan untuk “*salience politic*” belaka. Perhitungan pengambilalihan Freeport dengan skema utang sebesar \$3,85 miliar melalui Inalum (anak usaha MIND ID) lebih bertujuan untuk mengerek popularitas Jokowi menjelang Pemilu 2019 (Warburton, 2023). Realita itu mempertegas posisi BUMN semata kepanjangan tangan penguasa untuk tujuan pragmatis mempertahankan atau memperoleh kursi kekuasaan negara.

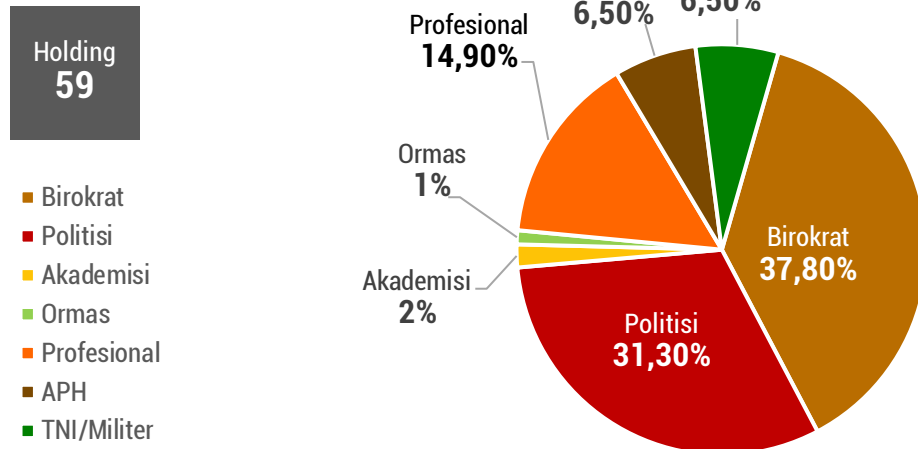
Genap setahun menjabat, sebanyak 40 wakil menteri kabinet Prabowo terdeteksi merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Artinya, relasi patron-klien masih terjaga dalam tubuh BUMN. Posisi komisaris yang menurut mandat UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), berfungsi sebagai penasehat dan pengawas perusahaan pun menjadi kabur karena proses uji tuntas (*due diligence*) serta *fit and proper test* dalam proses pengangkatan komisaris diabaikan.

BUMN semakin rentan diduduki oleh orang-orang dengan paparan *politically exposed persons* (PEPs) atau orang-orang yang berada pada area risiko korupsi yang signifikan. Menurut temuan TII dari riset yang dilakukan pada 13 Agustus 2025 hingga 25 September 2025, muncul alarm bahaya. Sebab, kursi-kursi dewan komisaris BUMN didominasi oleh politikus dari partai yang berkuasa saat ini.

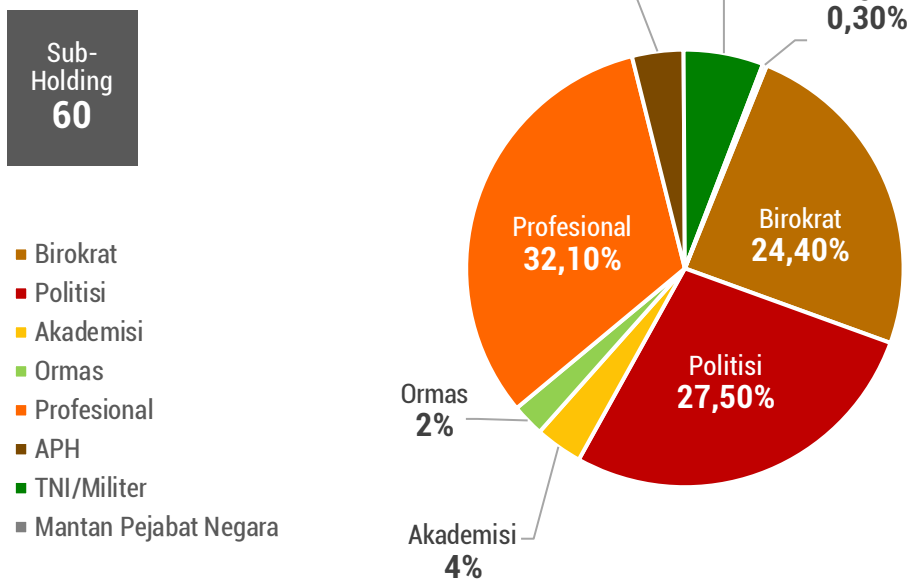


Ilustrasi 5. Sebaran PEPs Komisaris di Induk Usaha BUMN dan Entitas Anak

PEPs: di Induk Usaha BUMN



PEPs: di Sub-Holding

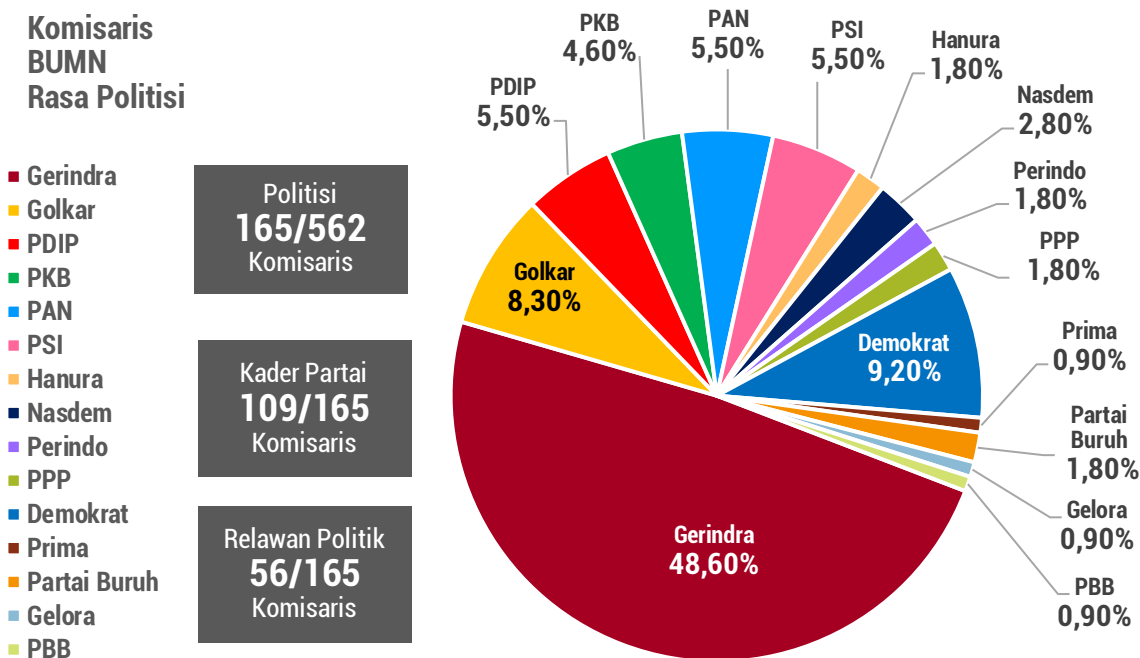


Dari 562 komisaris pada 59 induk usaha BUMN dan 60 entitas anak, 165 orang (29,4%) berlatar belakang politikus, dan 174 orang (31%) berasal dari kalangan birokrat. Jumlah komisaris dengan latar profesional hanya 23,7%, jauh di bawah ekspektasi meritokrasi. Sementara sisanya berasal dari militer (6,2%), aparat penegak hukum (5,2%), akademisi (2,7%), dan sisanya ormas.

Peta Kuasa: Komisaris Rasa Politikus

Dominasi birokrat dan politisi dalam jajaran komisaris 119 perusahaan tersebut menjadi titik awal untuk menelusuri lebih dalam latar belakang para komisaris berlatar politik. Fenomena ini penting untuk menunjukkan bahwa, hingga kini BUMN tetap berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dan para politisi -- seperti lagu lama yang terus diputar.

Ilustrasi 6. Komisaris Rasa Politisi



Dari kelompok politisi, dominasi partai berkuasa tampak mencolok. Gerindra, partai Presiden Prabowo Subianto, menduduki posisi tertinggi dengan 48,6% dari total politikus yang duduk sebagai komisaris. Di bawahnya, Demokrat (9,2%), Golkar (8,3%), PDIP, PAN, PSI, dan PKB berada di kisaran 4–6%. Sementara partai-partai lain seperti Partai Buruh, PRIMA, PPP, Perindo, Hanura, PBB, dan Gelora tercatat di bawah 2%.

Selain 109 komisaris berlatar politik, terdapat 56 komisaris lain yang dikategorikan sebagai politikus yang berasal dari kelompok relawan. Mayoritas dari mereka merupakan bagian dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo–Gibran pada Pemilu 2024.

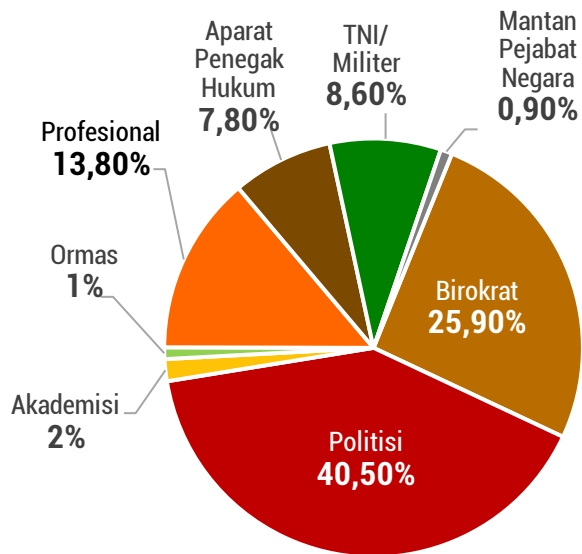
Berkaca dari temuan tersebut, jabatan komisaris direduksi menjadi perpanjangan tangan kekuasaan yang mengontrol arus informasi, keputusan bisnis, hingga distribusi keuntungan, bukan hanya sebagai pengawas bisnis. Di sejumlah *holding* dan *subholding*, terdapat pola penempatan yang sistematis: semakin strategis sektor bisnisnya—seperti sektor energi dan pangan—semakin tinggi pula proporsi politikus di kursi komisaris.

Sektor Strategis dan Risiko Konflik Kepentingan

PEPs: Sektor Energi

Sampel
19
Perusahaan

- Birokrat
- Politisi
- Akademisi
- Ormas
- Profesional
- APH
- TNI/Militer

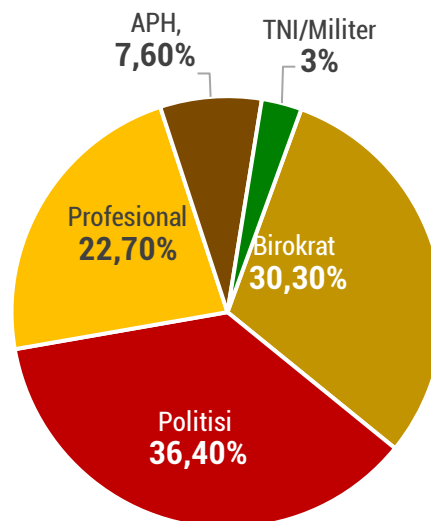


Di sektor energi, proporsi politikus sebagai komisaris mencapai 40,5%, jauh melampaui proporsi profesional (13,8%). Sektor ini dikenal memiliki potensi rente ekonomi besar, mulai dari pengelolaan migas, listrik, hingga proyek hilirisasi tambang dan energi baru terbarukan. Penempatan politikus di sektor strategis seperti ini menimbulkan risiko ganda: konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan bisnis dan kaburnya garis batas antara regulator dan operator.

PEPs: Sektor Pangan

Sampel
11
Perusahaan

- Birokrat
- Politisi
- Profesional
- APH
- TNI/Militer



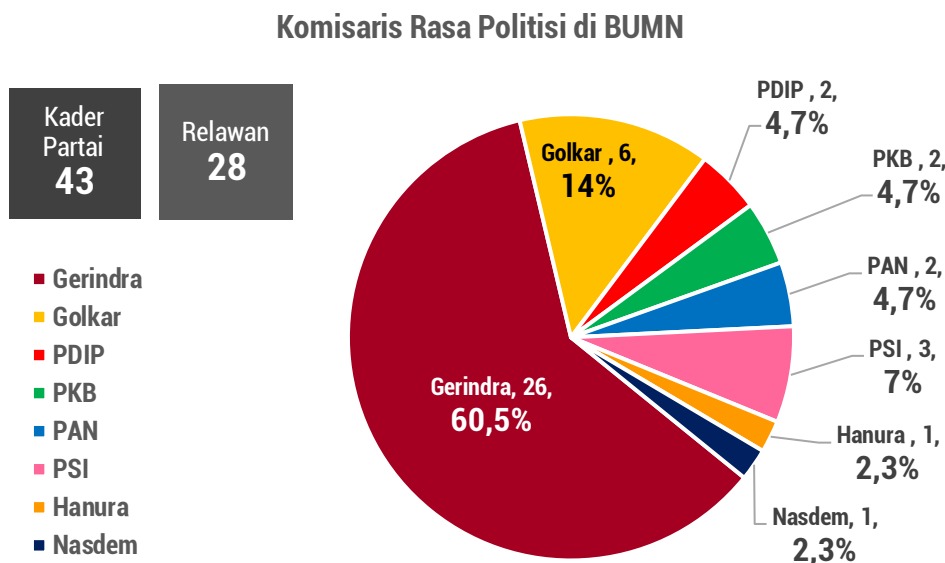
Fenomena serupa terjadi di sektor pangan, di mana komisaris berlatar belakang politikus mendominasi dengan persentase tertinggi (36,4%). Sektor ini menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto dalam ambisi ketahanan pangan dan energi yang tercantum dalam komitmen Asta Cita. Ambisi tersebut mempertegas kebutuhan akan intervensi politik yang kuat.

Dengan menilik jumlah komisaris berlatar politikus di sektor energi dan pangan, masuk akal bila intervensi langsung melalui kader partai di dua sektor strategis ini semakin menguat. Meski di permukaan tampak seperti integrasi antara visi politik dan implementasi kebijakan, pada faktanya ini merupakan arena krusial sekaligus berbahaya. Ruang bisnis yang seharusnya dijalankan secara profesional justru dikuasai oleh mereka yang memiliki kepentingan politik langsung.

Kondisi serupa juga terlihat pada tujuh BUMN yang mulai dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Konsolidasi tersebut menunjukkan pola konsentrasi kekuasaan yang semakin politis dan jauh dari prinsip tata kelola korporasi yang sehat.

Selain menunjukkan besarnya intervensi politik, praktik patronase juga berlangsung secara terang-terangan. Pola ini lazim mengarah pada bentuk korupsi yang dikenal sebagai *state capture*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan *state capture* sebagai korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta memengaruhi pembuatan kebijakan untuk keuntungan mereka sendiri. Korupsi tidak sekadar diukur dari *output* seperti “kerugian negara”, melainkan dari kehadiran individu-individu yang dipilih berdasarkan kedekatan personal, kesamaan identitas primordial, atau afiliasi partai politik. Mereka inilah yang kemudian berperan dalam membentuk aturan main—hukum, kebijakan, dan regulasi—yang menguntungkan kepentingan tertentu (Rothstein & Varraich, 2017).

Ilustrasi 8. Politisi di BUMN Danantara



Apabila ditelusuri lebih lanjut, terdapat 43 kader partai dan 28 relawan politik yang mendapat jatah posisi strategis dalam Danantara. Lebih dari separuh, tepatnya 60,5%, berafiliasi dengan Partai Gerindra. Disusul Partai Golkar (14%), PSI (7%), PKB, PDIP, dan PAN masing-masing 4,7%, serta Partai Hanura dan NasDem di angka 2,3%. Dominasi Gerindra ini mengingatkan pada pola kekuasaan era Orde Baru dan pasca-Orde Baru, ketika elite Golkar mendominasi sektor BUMN dan sumber daya alam (Warburton, 2023).

Fakta ini mempertegas kecenderungan Danantara menjadi reinkarnasi Pertamina era Orde Baru yang merupakan alat politik dan konsentrasi kekayaan bagi elite bisnis, partai penguasa, koneksi militer, bahkan keluarga dekat presiden. Patronase politik ini sangat berbahaya, sebab Danantara juga mengelola aset *liquid* dari nasabah bank-bank BUMN.

Alarm bahaya ini tidak semata karena besarnya dana yang dikelola, tetapi karena struktur dan logika politik yang melandasinya. Dengan ekonomi komando yang mengorkestrasi Danantara, pengelolaan aset *liquid* perbankan yang menghimpun dana warga, rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan, pemusatan sumber daya ke lingkaran kekuasaan, dan cenderung menciptakan instrumen finansial untuk menopang loyalitas politik.

Dengan adanya dana jumbo yang dikelola secara terkomando, risiko *moral hazard* meningkat tajam. Danantara rentan terjerembap menjadi *shadow treasury* atau kas paralel negara yang menolak tunduk pada mekanisme fiskal reguler, namun tetap menguasai arus likuiditas ekonomi nasional. Kondisi ini menunjukkan pertimbangan politik patron-klien menguasai setiap keputusan finansial, mengalahkan pertimbangan makro yang lebih rasional.

Selain itu, fenomena patron-klien dalam Danantara memperlihatkan reformasi BUMN selama ini belum menyentuh akar persoalan berupa budaya politik yang menjadikan jabatan publik sebagai alat distribusi kekuasaan. Kini kita dapat melihat dengan terang benderang, meskipun rezim berganti, cara-cara lama masih saja berjalan: patronase politik, besarnya potensi korupsi politik dan *state capture*, serta arah konsolidasi kekuasaan dari partai dominan yang semakin kentara.



TOLAK PPN
12 %

SOALNYA YANG
MAKAN SI
OLIGARKI

Situasi Demokrasi dan Kebebasan Sipil

Rezim Kekerasan dan Kriminalisasi

“Jadi sebenarnya bukan masalah aktivis ataupun bukan aktivis, tapi kami sedang melakukan proses penegakan hukum. Ada peristiwa-peristiwa pidana yang kita alami, kebetulan dia aktivis.”
Kapolri, Listyo Sigit

D i atas merupakan pernyataan Listyo sigit saat menjawab pertanyaan mengenai kriminalisasi aktivis dalam rentetan aksi Perlawanan Agustus. Sepanjang satu tahun ini pembungkaman kebebasan berekspresi telah banyak menggunakan metode kriminalisasi. Setidaknya kami mendata lebih dari 1000 orang dikriminalisasi dalam aksi Hari Buruh 2025, Perlawanan Agustus, dan gerakan anti tambang di berbagai daerah. Lalu, apa itu kriminalisasi?

Secara sederhana, ia hanya penggunaan teknologi pasal pidana kepada seseorang yang dianggap kriminal. Dan pelabelan suatu tindakan kriminal merupakan bagian dari kekerasan struktural yang dihadirkan dari distribusi yang tidak merata karena praktek kapitalisme (Galtung, 1969).⁴⁷ Kekerasan itu sendiri hadir dalam setiap fenomena eksploitasi terhadap buruh, penyingkiran populasi, dan ekstraksi sumber daya alam.⁴⁸ Namun, pemberian label pada kejahatan secara bersamaan menempatkan kesalahan pada individu dan memperkuat ideologi tatanan yang ada. Konsepsi kejahatan semacam ini melempar beban “kesalahan” dan “tanggung jawab” pada individu yang menyimpang secara moral, padahal seringkali hal itu merupakan hasil dari kondisi sosial.⁴⁹

Untuk mengetahui bangunan umum fungsi kriminalisasi di masa rezim Prabowo, periksalah watak demokratis atau tidaknya pembuatan kebijakan. Dengan cara ini, kita dapat melihat secara utuh apa motif ekonomi-politik penggunaan aparatus kekerasan negara dengan teknologi pemidanaan. Kita perlu menaruh kebijakan-kebijakan ini sebagai pemantik munculnya sikap politik individu atau kelompok oposisi yang menunjukkan ketidaksepakatan terhadap kelas penguasa.⁵⁰ Ini kemudian dimanifestasikan ke bentuk gerakan sosial yang selama ini menjadi ladang subur praktek kriminalisasi.

⁴⁷ Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191. <https://www.jstor.org/stable/422690>

⁴⁸ Smolski, A. R., & Lorenzen, M. (2021, January). Violence, Capital Accumulation, and Resistance in Contemporary Latin America. *Latin America Perspectives*, 48(1), 4-27. <https://www.jstor.org/stable/48634083>

⁴⁹ Ferrajoli, L., & Zolo, D. (1985, April). Marxism and the Criminal Question. *Law and Philosophy*, 4(1), 71-99. <https://www.jstor.org/stable/3504704>

⁵⁰ Davenport, Christian. (2007). State Repression and Political Order. *Annual Review of Political Science*. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.101405.143216>. Lihat juga, Sullivan, C. M. & Davenport, C. (2017). The Rebel Alliance Strikes Back: Understanding The Politics of Backlash Mobilization. *Mobilization: An International Quarterly*, 22(1), 39-56. <https://doi.org/10.17813/1086-671X-22-1-39>

Selama satu tahun ke belakang, gelombang perlawanan muncul karena dipantik model pembuatan kebijakan anti-demokratik. Ini bisa dalam bentuk kontennya ataupun cara melahirkannya. Danantara adalah satu contoh, dipidatoken oleh presiden berulang kali kemudian disambut dengan revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara secara cepat oleh DPR pada 4 Februari tanpa menyerap partisipasi publik secara bermakna. Dua puluh hari setelahnya, Presiden resmi meluncurkan Danantara dan menandatangani pembentukan Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara. Prosesnya berlangsung cepat, dan tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami dampak regulasi ini. Proses serupa terjadi pada pengesahan revisi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia. Proses pembuatannya tertutup dan cepat, kemudian menyulut gelombang demonstrasi di berbagai daerah, dimana *tempus delicti*-nya kemudian menghasilkan kriminalisasi 14 demonstran di Jakarta, 4 di Bandung, dan 5 di Semarang.



Ilustrasi 9. Linimasa Percepatan Revisi UU TNI 2025



Tabel 10. Gugatan Uji Formil Ke Mahkamah Agung Sepanjang 2025

No	No Perkara	UU	Tentang	Substansi	Putusan
1	45/PUU-XXIII/2025	UU No. 3 Tahun 2025	Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Prosedur P3U, transparansi/ keterbukaan informasi dan partisipasi bermakna	Ditolak
2	52/PUU-XXIII/2025	UU No. 1 Tahun 2025	Perubahan Ketiga Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Tidak transparan dan terbuka. Partisipasi bermakna	Ditolak
3	55/PUU-XXIII/2025	UU No. 3 Tahun 2025	Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Rancangan undang-undang ini tidak pernah dipublikasikan, sehingga tidak dapat diakses dengan mudah oleh Para Pemohon. Dan partisipasi bermakna	Ditolak
4	56/PUU-XXIII/2025	UU No. 3 Tahun 2025	Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Keterbukaan informasi dan partisipasi bermakna	Ditolak
5	57/PUU-XXIII/2025	UU No. 3 Tahun 2025	Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia		
6	58/PUU-XXIII/2025	UU No. 3 Tahun 2025	Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Pengaksesan terhadap Risalah Rapat DPR tersebut susah untuk dijangkau. Tidak ada info konsinyering	Ditolak
7	64/PUU-XXIII/2025		Perubahan Ketiga Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Tidak adanya partisipasi yang bermakna (meaningful participation)	Ditolak
8	66/PUU-XXIII/2025	UU No. 3 Tahun 2025	Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Terdapat penyimpangan prosedur pembentukan undang-undang berupa perubahan terhadap naskah rancangan undang-undang yang mencakup substansi ayat, pasal, dan/atau bagian dari pasal setelah RUU disetujui oleh Presiden pada tanggal 26 Maret 2025 yang seharusnya tidak boleh diubah di luar mekanisme legislasi resmi	Ditolak
9	69/PUU-XXIII/2025	UU No. 3 Tahun 2025	Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Partisipasi bermakna	
10	74/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025	Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Tidak transparan dan minim partisipasi publik	Ditolak
11	75/PUU-XXIII/2025	UU No. 3 Tahun 2025	Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Kedaulatan rakyat = Partisipasi rakyat	
12	79/PUU-XXIII/2025	UU No. 3 Tahun 2025	Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	<i>Good legislation process</i> yang tidak memadai. Kemudian, tidak adanya partisipasi publik yang bermakna.	Ditolak
13	81/PUU-XXIII/2025	UU No. 3 Tahun 2025	Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Partisipasi publik yang bermakna. Bahwa fenomena <i>autocratic legalism</i> dan <i>abusive lawmaking</i>	Ditolak
14	83/PUU-XXIII/2025	UU No. 3 Tahun 2025	Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Pembahasan dilakukan secara tertutup dan tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Ditolak

Keterangan: Selama satu tahun Prabowo-Gibran, telah ada 14 gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terdiri dari 12 gugatan mengenai UU No 3/2025 tentang TNI dan dua lagi UU No 1/2025 tentang BUMN. Semua gugatan tersebut ditolak. Kondisi ini menandakan watak pembentukan kebijakan yang anti-demokratik dan tidak transparan, serta tidak memberi ruang bagi partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan regulasi.

Eskalasi Kekerasan dan Kriminalisasi

Di tengah situasi darurat demokrasi dalam pembuatan kebijakan dan krisis ekonomi, sektor keamanan mendapatkan APBN terbesar. Institusi Polri, pada satu tahun pertama, mendapatkan APBN terbesar kedua setelah Kementerian Pertahanan dengan alokasi sebesar Rp 138,5 triliun. Ini menunjukkan bahwa negara merespon krisis tersebut dengan mendorong penggunaan alat represi untuk bekerja semakin aktif. Lantas, bagaimana situasi di lapangan?

Kriminalisasi Anti-Ekstraktivisme

Industri ekstraktif di Indonesia semakin meluas dalam satu dekade terakhir. Dan rezim yang berkuasa mempunyai cara untuk melanggengkan proyek-proyek raksasa mereka, untuk membungkam perlawanan rakyat yang mempertahankan ruang hidupnya: kriminalisasi

Tren kriminalisasi dan kekerasan terhadap gerakan anti-ekstraktivisme meningkat setiap tahun. Peristiwa terbaru adalah pemidanaan 11 warga adat Maba Sangaji, Halmahera Timur.⁵¹ Mereka diputus bersalah dan dihukum 5 bulan 8 hari penjara atas dakwaan melanggar Pasal 162 Undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu bara. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang berizin dapat dipenjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp100 juta. Di balik upaya "merintang" tersebut, warga adat Maba Sangaji sedang berjuang untuk mempertahankan tanahnya dari kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas tambang PT Position.⁵²

Selain 11 warga adat Maba Sangaji, selama Oktober 2024-2025 terdapat 80 orang dikriminalisasi karena melawan aktivitas industri tambang: dengan pasal 162 Undang-undang Minerba. Itu terjadi dari Poco Leok, Flores, hingga Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, di titik-titik perlawanan atas industri geothermal dan nikel. Pemidanaan ini untuk membungkam warga yang berani menentang dan berhadapan dengan bisnis utama elit Indonesia, yang sebagian besar adalah ekonomi ekstraktif.

**BEBASKAN
11 TAHANAN POLITIK
MABA SANGAJI MELAWAN**

⁵¹ Rabul Sawal, (2025, 16 Oktober), "Hakim Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji Bersalah! "Tanah Adat Kalah dari Izin Tambang", [Kadera.id](#).

⁵² Jatim, (2025, 17 Oktober), "Vonis 11 Warga Maba Sangaji: Polisi dan Korporasi Bersekongkol, Negara Melegitimasi Kriminalisasi Pembela Lingkungan," [Jatam.org](#). Diakses pada 18 Oktober, 2025.

Tabel 11. Korban Kriminalisasi-Kekerasan di Industri Ekstraktif⁵³

Waktu	Wilayah	Komoditas	Jumlah
Oktober 2024	Morowali, Sulawesi Selatan	Nikel	5
Oktober 2024	Poco Leok, NTT	Panas Bumi	4
Oktober 2024	Wawonii, Sulawesi Tenggara	Nikel	7
Februari 2025	Gunung Gede, Jawa Barat	Panas Bumi	1
Maret 2025	Mamuju Tengah, Sulawesi Barat	Batuan Pasir	21
Maret 2025	Poco Leok, NTT	Panas Bumi	6
April 2025	Karawang, Jawa Barat	Karst	2
Mei 2025	Halmahera Timur, Maluku Utara	Nikel	27
Juli 2025	Muara Kate, Kalimantan Timur	Batu Bara	3
Juli 2025	Pulau Obi, Maluku Utara	Nikel	1
Juli 2025	Negeri Haya, Maluku	Pasir Granit	2
September 2025	Tanah Merah, Kalimantan Timur	Batu Bara	1

Hari Buruh 2025

Selama satu tahun terakhir, setidaknya ribuan orang dikriminalisasi dalam berbagai macam demonstrasi. Pada bulan Mei 2025, setidaknya 23 massa aksi Hari Buruh 2025 di Jakarta, Semarang, dan Bandung dikriminalisasi. Sebanyak 14 massa aksi di Jakarta dikenakan pasal 212 (melawan pejabat), 216 (tidak menuruti perintah, 218 (menyerang martabat presiden atau wakil presiden) KUHP. Sedangkan di Bandung, 4 massa aksi didakwa dengan Pasal 170 ayat (1) (pengrusakan) KUHP, dan diputus bersalah oleh hakim dengan hukuman penjara 5 bulan penjara. Di Semarang, 8 massa aksi ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal 214 dan 170 KUHP. Kendati kriminalisasi mereka di momen Hari Buruh 2025, namun gerakan yang dimobilisasi adalah penolakan terhadap pengesahan revisi UU TNI. Di Jakarta, massa aksi yang diperiksa dituduh sebagai anarko. Mereka yang ditangkap juga mendapat penyiksaan fisik maupun psikis.

Revisi UU TNI sendiri secara politis memperluas peran militer dalam mengisi jabatan, membuat operasi-operasi militer non-perang (OMSP) menjadi lebih fleksibel, serta membuka peluang militer semakin dalam mengintervensi politik (YLBHI, 2025). Pasca revisi tersebut disahkan, setidaknya 11 permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi ditolak. Penolakan ini memberikan nuansa bahwa prosedur pembentukan revisi UU TNI benar. Kriminalisasi 14 massa aksi dan tenaga medis tersebut menjadi politis dalam hal ini setelah Prabowo menghadiri peringatan Hari Buruh di Monas dan kecamatan Said Iqbal terhadap aksi 'anarkis' di Semarang diikuti permintaannya aparat menindak tegas.

⁵³ Data Korban Kriminalisasi-Kekerasan di Industri Ekstraktif. Diolah oleh Database JATAM dan YLBHI, 18 Oktober 2025.

Perlawanan Agustus

Hingga akhir September 2025, Polri merilis setidaknya 997 orang menjadi tersangka dalam aksi-aksi akhir Agustus tahun yang sama. Polisi menetapkan semua tersangka tersebut setelah menangkap 5.444 orang. Di dalam kantor polisi, penyiksaan banyak dilakukan oleh aparat kepolisian.

Perburuan besar-besaran ini terjadi setelah Prabowo memerintahkan TNI dan Polri “mengambil langkah tegas” (CNBC, 2025) setelah dirinya mengatakan di depan media massa bahwa terdapat aksi-aksi “makar” dan “terorisme” (Saputra, 2025). Di lapangan, polisi di berbagai daerah beramai-ramai melabeli mereka yang terlibat atau dituduh terlibat kerusuhan sebagai anarko (Bustomi, 2025; Sutriyanto, 2025; Polres Klaten, 2025).

Pasal-pasal yang disangkakan terhadap mereka yang ditangkap dan kriminalisasi didasarkan pada tindakan yang diatur dalam KUHP seperti pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 187 KUHP tentang pembakaran, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama, pasal 28 ayat (2 dan 3) UU ITE tentang berita bohong dan penghasutan, hingga Pasal 1 ayat 2 UU Darurat No 12 Tahun 1951. Klasterisasi penangkapan dilakukan antara pelaku lapangan dan mereka yang dianggap sebagai provokator. Polda Jakarta membaginya menjadi kluster penghasut, perusuh, penjarahan, pengrusakan fasum, dan pencurian senjata.

Kluster perusuh dan penghasut dibangun untuk menguatkan dalil kepolisian terkait demonstrasi-demonstrasi yang terjadi, (selalu) terdapat dalang di baliknya. Narasi ini penting untuk dibangun jika rezim hendak mengaburkan (dorongan) kesadaran/keresahan apa yang membuat rakyat bergerak terlibat dalam aksi. Selain Pasal tersebut juga ditemukan pasal-pasal lain yang digunakan diantaranya: Pasal 406, Pasal 66 UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Sehingga, analisa mengenai mengapa orang turun ke jalan pada akhir Agustus lalu akan mengarah pada pasal-pasal pidana dan bangunan teori dalang. Bukan keresahan karena masalah ekonomi yang semakin menyulitkan rakyat.

Untuk mencari “dalang”, kepolisian menangkap massa aksi di lapangan sekaligus memburu para aktivis yang aktif menyuarakan pendapat di media sosial. Ketika penangkapan sudah dilakukan, polisi menghalang-halangi akses bantuan hukum, terutama penghalang-halangan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ini dilakukan agar polisi dapat leluasa melakukan penyelidikan. Termasuk penyelidikan dengan upaya-upaya paksa hingga penyiksaan.

Pada akhirnya, satu tahun ke belakang, kita menyaksikan lebih dari 1000 individu dikriminalisasi karena terlibat dalam aksi-aksi kolektif. Ini adalah satu potret yang sering kita sebut sebagai kriminalisasi. Ini adalah potret mundurnya demokrasi di Indonesia dan menyempitnya ruang kebebasan berekspresi. Melihat dari tiga fenomena di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kriminalisasi dapat dimaknai sebagai upaya penegakan hukum bermotif ekonomi-politik dengan cara depolitisasi pikiran dan hati nurani warga negara. Konflik yang didasari pada ekonomi-politik disederhanakan dengan sebatas pelabelan tindakan kriminal oleh individu. Di bawah rezim Prabowo - Gibran mereka memilih untuk mengedepankan kekerasan untuk menghadapi gelombang aksi-aksi sepanjang satu tahun ke belakang ini, kriminalisasi dan penyiksaan menjadi metode utama.

Pendekatan kriminalisasi dengan cara penculikan dan label “anarkis” telah menjadi pola di satu tahun ke belakang. Terkhusus mengenai label “anarkis”, pola ini sudah mulai nampak dari tahun 2019, yang secara historis dipantik dari kriminalisasi terhadap aktivis di Yogyakarta yang menolak pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport pada tahun 2018. Penangkapan semena-mena ini yang kemudian nanti akan dilegitimasi dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di khususnya bagian yang mengatur bahwa polisi boleh menangkap kapanpun seseorang dengan dalih keadaan mendesak (draft pasal 87 dan 90 ayat (2)). Wewenang polisi hari ini juga semakin besar untuk melakukan tindakan represif atas dasar “keadaan mendesak” setelah Kapolri mengesahkan Perkapolri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Kepolisian RI. Peraturan ini secara umum melegalkan aparat kepolisian untuk menindak secara represif secara sewenang-wenang, termasuk penggunaan senjata api peluru karet dan tajam.



Situasi Politik: Kamufase Militer Berbaju Sipil

Militer Sebagai Mesin Birokrasi Politik

Belum genap setahun memerintah, Prabowo sudah memperbesar kekuatan organisasi militer. Ia bahkan memulainya sejak menjabat Menteri Pertahanan di era pemerintahan Joko Widodo. Ia merencanakan pembangunan 22 Komando Daerah Militer (Kodam) baru, pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan dan pembentukan Komponen Cadangan. Puncaknya, pengesahan UU TNI Tahun 2025 membuka jalan bagi pembesaran ini, yang menandai perluasan peran tentara di luar urusan pertahanan.⁵⁴

Prabowo menggunakan diskresinya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI, merevisi Perpres No. 66/2019 pada Agustus lalu. Melalui regulasi ini, ia menambahkan 49 jabatan baru bagi perwira tinggi, sehingga total posisi struktural di tubuh TNI kini mencapai 420 jabatan.

Langkah ini diikuti dengan pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP), dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang diumumkan pada 10 Agustus 2025.

Selain itu, tiga grup baru Komando Pasukan Khusus (Kopassus) juga dibentuk dan ditempatkan di Dumai (Riau), Penajam (Ibu Kota Nusantara), dan Kendari (Sulawesi Tenggara), menjadikan total unit Kopassus kini berjumlah enam grup.

⁵⁴ Iqbal Basyari, (2025, 09 Agustus), "Organisasi TNI Membesar, 49 Jabatan Baru Hingga Penambahan Kodam dan Kopassus", [Kompas.id](https://kompas.id). Diakses 16 Oktober 2025.



Tabel 12. Enam Kodam Baru

No	Nama Kodam	Lokasi
1	Kodam XIX/Tuanku Tambusai	Riau dan Kepulauan Riau
2	Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol	Padang dan Jambi
3	Kodam XXI/Radin Inten	Lampung dan Bengkulu
4	Kodam XXII/Tambun Bungai	Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
5	Kodam XXIII/Palaka Wira	Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat
6	Kodam XXIV/Mandala Trikora	Merauke, Papua Selatan

Perhatikan rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang akan disebar di 514 kabupaten/kota, dengan target rekrutmen sebanyak 24.000 tamtama. Struktur batalyon ini terdiri dari tiga kompi: Kompi Pertanian dan Peternakan, Kompi Kesehatan, dan Kompi Konstruksi.

Dengan alokasi lahan seluas 30 hektare untuk masing-masing batalyon, Prabowo menugaskan setiap kompi untuk menjalankan program pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan dan energi. Melalui skema ini, Prabowo tampak melimpahkan eksekusi program-program rezimnya kepada prajurit TNI. Sehingga secara kasat mata terlihat Prabowo sedang menggeser peran militer dari fungsi pertahanan ke ranah pembangunan sipil.



Tabel 13. Batalyon Teritorial Pembangunan

No	Nama Batalyon	Lokasi	Jumlah Prajurit	Kepentingan
1	Batalyon Infanteri (Yonif) Teritorial Pembangunan (Yon Terbang)	Kodam XVIII/ Cenderawasih di Papua		PSN untuk <i>food estate</i> di Merauke
2	Batalyon Teritorial Pembangunan (TP)—Batalyon 838	Cilacap	1000 prajurit, tetapi baru terisi setengah	
3	Batalyon Teritorial Pembangunan (TP)—Batalyon 888	Kabupaten Rembang	Dalam proses persetujuan pembentukan	
4	100 Yonif Teritorial Pembangunan (TP)		Terdiri dari: 1. Kompi pertanian dan peternakan 2. Kompi kesehatan 3. Kompi konstruksi Setiap kompi diisi dengan 150 hingga 200 prajurit yang akan direkrut dari putra daerah setiap wilayah	Penguatan ketahanan pangan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur
5	20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP)	Terdapat di: • Papua (4 satuan) • Sumatera (6 satuan) • Kalimantan (3 satuan) • Bali-Nusra (1 satuan) • Sulawesi (2 satuan) • Maluku (1 satuan)		

Ekspansi organisasi militer berarti ekspansi kekuatan politik militer. Menurut analisis pengamat militer yang dikutip oleh Kontan, jumlah personel TNI diproyeksikan mencapai 1 juta pada akhir masa jabatan Prabowo di 2029. Ini belum termasuk 700 ribu personel Komponen Cadangan (Komcad) yang disiapkan melalui skema pertahanan semesta.⁵⁵

⁵⁵ Arif Ferdianto, (2025, 11 Agustus), "Pemekaran TNI, Pengamat Militer: Tahun 2029 Diharapkan Indonesia Punya 1 Juta Personel", [Kontan.co.id](https://kontan.co.id).

Dengan skala sebesar itu, militer berpotensi kembali menjadi kekuatan politik yang dominan, yang mengulang pola kekuasaan era Orde Baru. Peningkatan kekuatan militer ini bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga membuka ruang bagi militer untuk kembali masuk ke ranah bisnis dan ekonomi. Padahal, paska kejatuhan Soeharto, bisnis militer sempat dilucuti melalui penerapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang memisahkan peran militer dari aktivitas ekonomi. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono merapikan bisnis militer sebagai agenda reformasi TNI.⁵⁶ Pada 2004, pemerintah melakukan proses divestasi bisnis tentara, baik melalui likuidasi perusahaan-perusahaan mereka ataupun menyerahkannya kepada Negara.⁵⁷

Namun, ekspansi personel dan struktur saat ini menunjukkan arah sebaliknya. Militer bukan hanya dipulihkan sebagai aktor pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan dan ekonomi, dengan potensi patronase yang melakukan penetrasi ke sektor-sektor strategis. Panggung yang diberikan Prabowo kepada TNI dan bekas para jenderal, langsung maupun tidak, mengusung agenda untuk memulihkan bisnis elit-elit tertinggi tentara.⁵⁸ Menggunakan kekuatan bersenjata dan pembesaran organisasi, mereka akan bangkit kembali sebagai kekuatan kelas borjuis terkuat di Indonesia. Kekuatan politik militer ini secara bertahap melemahkan atau malah mematikan demokrasi.⁵⁹

Dalam sekejap, Prabowo membawa militer mengisi jabatan sipil penting di kabinet. Setidaknya terdapat 11 politikus dengan latar belakang militer menduduki posisi menteri dan wakil menteri dalam jajaran Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Menko Polkam Damari Chaniago, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Wamenko Polkam Lodewijk Fiederich Paulus, Wamen Setneg Bambang Eko Suharyanto, Wamenhan Donny Ermawan, Wamen KKP Didit Herdiawan, dan Wamen ATR-BPN Ossy Dermawan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ini merupakan persoalan serius. Apabila kita bandingkan dengan pasca-reformasi, setidaknya hingga kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan Menteri Pertahanan pun tak berlatar belakang militer.

Prabowo menebalkan peran militer dengan memasukkan 4.472 prajurit TNI aktif ke dalam jabatan sipil di sejumlah kementerian dan lembaga. Jumlah ini meningkat dari 2.569 prajurit TNI yang menempati jabatan sipil pada 2023.⁶⁰ Ia juga nampak menyepelekan pelanggaran HAM berat masa lampau. Ini terbaca dari kehadiran bekas anggota tim mawar -- yang menjadi dalang penculikan aktivis pada 1998 -- sebagai pengisi jabatan struktural di lembaga negara.⁶¹

⁵⁶ Yusa Djuyandi, (2009, 05 Oktober), "Pengalihan Aktivitas Bisnis Militer di Indonesia", [Detik.com](https://detik.com). Diakses 24 Oktober 2025.

⁵⁷ Bonnie Setiawan, (2016, 24 Oktober), "Reformasi Militer di Bidang Bisnis Kapan Dituntaskan?", [IndoProgress.com](https://indoprogress.com). Diakses 24 Oktober 2025.

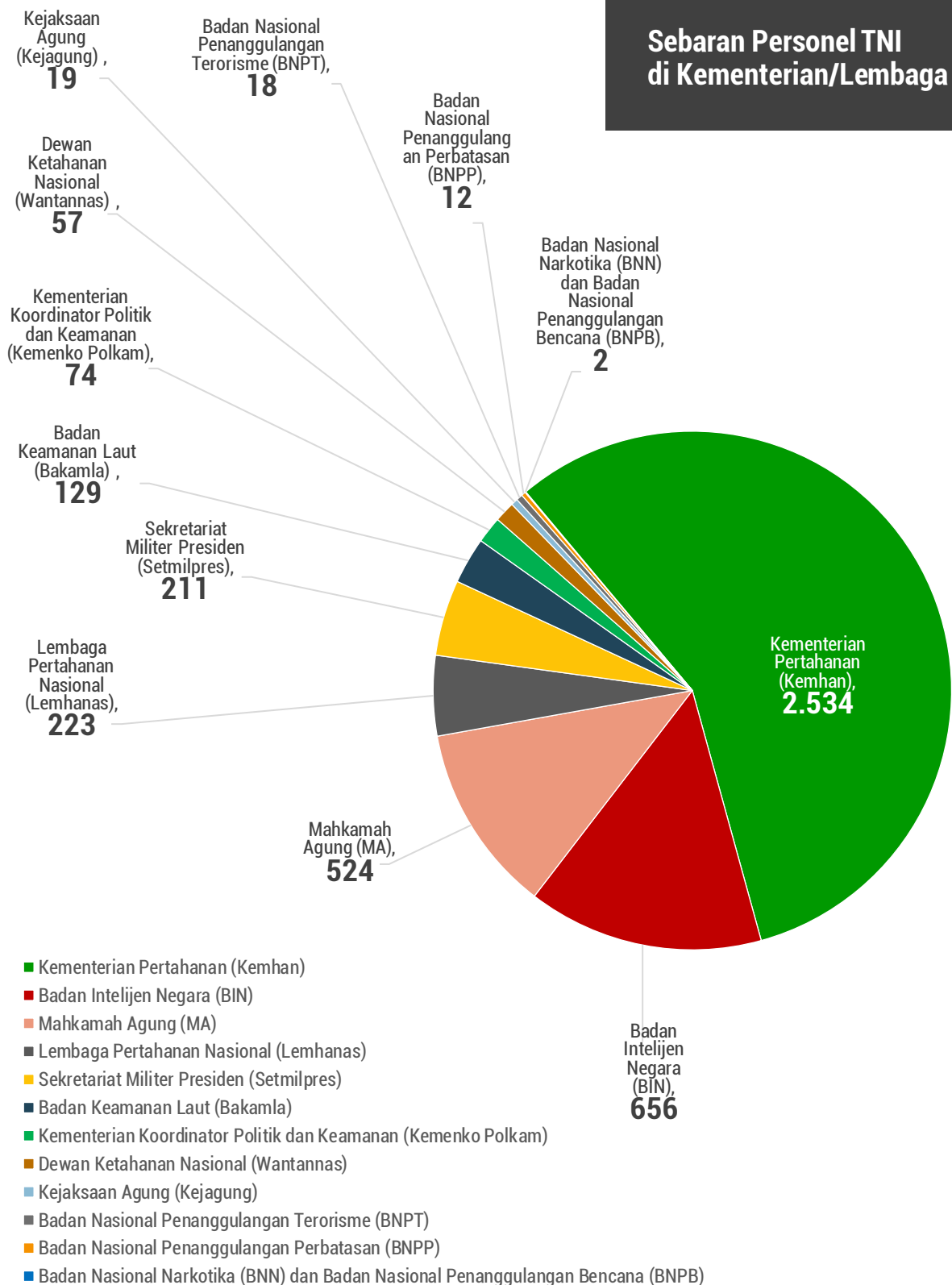
⁵⁸ Lihat, bagian *Linimasa Setahun Rezim Prabowo*, terutama pembahasan tentang pembentukan Agrinas untuk mendapatkan gambaran bahwa militer dibukakan jalan untuk kembali berbisnis secara legal.

⁵⁹ Made Supriatma, (2025, 14 Mei), "Peran Militer Membesar: Apakah Prabowo Sedang Melakukan Autogolpe?" [Projectmultatuli.org](https://projectmultatuli.org). Diakses 16 Oktober 2025.

⁶⁰ Syahrul Baihaqi, (2025, 26 Maret), "4.472 Prajurit TNI Duduki Jabatan Sipil, PBHI Desak Komisi I Lakukan Evaluasi", [Forumkeadilan.com](https://forumkeadilan.com). Diakses 16 Oktober 2025.

⁶¹ Danie Ahmad Fajri, (2024, 13 Desember), "Mantan Anggota Tim Mawar Kopassus Menempati Posisi Penting di Pemerintahan Prabowo," [Tempo.co](https://tempo.co). Diakses 16 Oktober 2025.

Sebaran Personel TNI di Kementerian/Lembaga



Dengan pola tersebut, Prabowo secara terbuka mengubah militer menjadi pelaksana kebijakan (*policy executioner*) dan mengerdilkan peranan birokrasi sipil.⁶² Militer terlibat langsung dalam program pertanian, ketahanan pangan, koperasi desa (atau koperasi merah putih) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG)— belakangan dipelesetkan menjadi Makan Beracun Gratis karena memicu keracunan pada ribuan siswa di berbagai wilayah Indonesia.⁶³

Tentara juga berperan sentral dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Disahkan melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, Satgas ini menyita lahan di kawasan hutan yang bermasalah secara administratif, dan sitaannya sudah mencapai 1 juta hektare perkebunan sawit,⁶⁴ yang diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Perusahaan ini berdiri atas instruksi langsung Prabowo⁶⁵ dan berisi jajaran pensiunan jenderal militer.⁶⁶

Ada banyak lagi keterlibatan tentara di ranah sipil. Satu di antaranya, tentara melatih sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) selama tiga bulan sebelum mereka diterjunkan mengurus dapur-dapur MBG. Tentara juga didorong bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembangunan daerah.⁶⁷

Prabowo bahkan bertindak lebih jauh dengan mengarusutamakan gaya militer dalam kegiatan-kegiatan sipil. Ia menginstruksikan pemutaran lagu "Indonesia Raya" di stasiun kereta api setiap pukul 10.00; menggelar retret pemerintahannya dengan gaya militeristik di Akademi Militer Magelang;⁶⁸ dan melatih pejabat, aparatur sipil nasional (ASN), hingga sarjana penggerak pembangunan dengan doktrin-doktrin militer. Kejadian-kejadian ini merefleksikan Prabowo berambisi kuat menerapkan "politik komando" dan mewujudkan sentralisasi kekuasaan.

Arkian, tampak bahwa "politik komando" adalah kata kunci rezim Prabowo. Ia mentransformasi militer, dalam waktu singkat, menjadi mesin birokrasi karena ingin memerintah negara dengan politik komando. Gambaran dari ambisi ini tercermin dalam pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN), dan penempatan orang-orang berlatar militer di dalamnya, untuk menggarap program gigantis seperti MBG.

Badan Gizi Nasional bekerja sendiri dengan otoritas terpusat, tanpa mengikutsertakan kementerian, dan menerabas otoritas sipil di daerah-daerah. Misalnya, BGN memegang kewenangan memutuskan siapa dapat menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan membanjung dapur-dapur MBG. Banyak yayasan pengelola MBG terafiliasi dengan keluarga Prabowo dan militer. TNI kini mengelola 452 SPPG dari 2.000 yang ditargetkan,⁶⁹ dan mereka mengirim rombongan ke Singapura untuk belajar manajemen program MBG.⁷⁰

⁶² Made Supriatma, (2025, 14 Mei), "Peran Militer Membesar: Apakah Prabowo Sedang Melakukan Autogolpe?" [Projectmultatuli.org](https://projectmultatuli.org). Diakses 16 Oktober 2025.

⁶³ Ervana Trikarinaputri, (2025, 13 Oktober) "Korban Keracunan MBG Paling Banyak di Jawa Barat, Capai 4.125 Orang," [Tempo.co](https://tempo.co). Diakses 16 Oktober 2025.

⁶⁴ Raden Ariyo Wicaksono, (2025, 28 Maret), Kebun Sawit yang Disita Satgas PKH Luasnya Sudah Capai 1 Juta Ha," [Betahita.id](https://betahita.id). Diakses 16 Oktober 2025.

⁶⁵ Rika Agraeni dan Ni Luh Anggela, (2025, 12 Agustus), "Profil Agrinas Bentuk Prabowo, BUMN Sektor Pangan di Bawah Danantara," [Bisnis.com](https://bisnis.com). Diakses 16 Oktober 2025.

⁶⁶ Qaayum Amri, (2025, 15 Maret), "Jajaran Komisari dan Direksi Agrinas Palma Nusantara Terbaru, Kombinasi Terbaik dari Purnawirawan TNI dan Profesional," [Sawitindonesia.com](https://sawitindonesia.com). Diakses 16 Oktober 2025.

⁶⁷ Humas Jabar, (2025, 15 Maret), "Pemdaprov-TNI AD Tandatangani Kerja Sama Manungga Karya Bakti," [Jabarprov.go.id](https://jabarprov.go.id). Diakses 16 Oktober 2025.

⁶⁸ Eka Yudha Saputra, (2025, 21 Februari), "Di Era Prabowo, Kepala Daerah Pun Bergaya Militer", [Tempo.co](https://tempo.co). Diakses 16 Oktober 2025.

⁶⁹ Dinda Shabrina, (2025, 27 September), "TNI Kini Kelola 452 SPPG untuk Proyek Makan Bergizi Gratis", [Tempo.co](https://tempo.co). Diakses 16 Oktober 2025.

⁷⁰ CNN Indonesia, (2025, 13 Oktober 2025), "TNI AD Kirim Rombongan ke Singapura Belajar Manajemen Program MBG", [CNNIndonesia.com](https://cnnindonesia.com). Diakses 16 Oktober 2025.

Penggunaan birokrasi militer tak lepas dari keberadaan “doktrin komando teritorial” di tubuh TNI. Doktrin ini telah menempatkan markas-markas militer bersisian dengan pemerintahan sipil di setiap wilayah negeri, sehingga melahirkan “pemerintahan bayangan”, serta memudahkan mobilisasi secara terpusat lewat rantai komando. Ekspresi penggunaan doktrin komando teritorial mengemuka dalam pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan, yang akan mengerahkan pasukan militer untuk mengerjakan program ketahanan pangan dan sebagainya. Pengamat politik militer, Made Supriatma, mengatakan inilah harga yang harus dibayar dari kegagalan mereformasi “komando teritorial” yang selama ini menghambat otonomi pemerintahan sipil tanpa bayang-bayang militer.⁷¹

Selain itu, Prabowo juga potensial memaksimalkan Gerindra dan koalisinya dalam menjalankan “politik komando” tersebut. Sebagaimana temuan ICW, terdapat 57 dari 74 (77%) Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2024-2029 yang terafiliasi secara politik dengan Partai Gerindra dan/atau Presiden Prabowo Subianto dan/atau Koalisi Indonesia Maju (KIM). Kalau hanya merujuk gubernur (tanpa wakil), setidaknya 83% dari total kepala daerah terpilih di 37 Provinsi terafiliasi secara politik dengan Partai Gerindra dan/atau Presiden Prabowo Subianto dan/atau Koalisi Indonesia Maju (KIM). Di tengah iklim politik yang tunduk pada mandat ketua partai, data-data ini menyajikan satu pola bahwa rezim Prabowo kemungkinan besar akan kian membatasi otonomi daerah dan menguatkan sentralisasi kekuasaan.⁷²

Bukan saja memusatkan kekuasaan, Prabowo juga meluaskan pemerintahan “tanpa oposisi” dengan merangkul semua lawan politik sebagaimana tergambar dari kabinetnya yang gemuk. Dalam kata lain, Prabowo tetap bekerja dengan langgam lama: mengkonsolidasi elit politik dan oligarki. Ini adalah fenomena khas iklim politik di Indonesia yang gagal melahirkan oposisi meskipun menjalankan Pemilihan Umum secara demokratis. Politik kartel dan partai-partai tanpa ideologi (tapi berporos pada tokoh elit) adalah penghambat lahirnya oposisi yang kuat dan konsisten. Sebab, partai-partai politik secara pragmatis dapat membentuk koalisi dengan presiden yang berkuasa. Apalagi pengaruh oligarki di balik politik elektoral teramat besar, sehingga memaksa siapa pun rezim yang memimpin harus bagi-bagi kue kekuasaan (*power-sharing*). Ini menyebabkan stagnasi demokrasi, dan dalam satu dekade terakhir semakin mengarah pada regresi.



⁷¹ Made Supriatma, (2025, 14 Mei), “Peran Militer Membesar: Apakah Prabowo Sedang Melakukan Autogolpe?” [Projectmultatuli.org](https://projectmultatuli.org). Diakses 16 Oktober 2025.

⁷² Yassar Aulia, Egi Primayogha, dan Seira Tamara, Pemerintahan Daerah: Terhimpit Politik-Pebisnis Ekstraktif dan Ambisi Resentralisasi. Jakarta: [Indonesia Corruption Watch](https://indonesiacorruptionwatch.org), 2025. Diakses 17 Oktober 2025.

Rezim Otokratik: Antara Politik Komando dan Ekonomi Komando

Cara Prabowo mengorkestrasi rezimnya di ranah politik berkait-kelindan dengan proses mengorganisir ekonomi nasional secara sentralistik. Untuk merangsang pertumbuhan, arah kebijakan tetap difokuskan pada ekonomi ekstraktif, baik atas nama transisi energi maupun kedaulatan pangan. Bertopangnya elit borjuis dalam negeri di sektor industri ekstraktif ini akan dibantu dengan proyek-proyek infrastruktur. Ini adalah paket kebijakan ekstraktivisme di Indonesia yang ke depan berpotensi akan lebih besar lagi merampas tanah-tanah masyarakat pedesaan.

Secara otokratik, ia membentuk Danantara dan mengonsolidasikan aset negara dan kapital negeri dalam rangka menopang ekstraktivisme tersebut. Kebijakan ini dilakukan setelah investasi asing melesu dan kelas pemilik modal dalam negeri yang tercecceh tidak mampu menopang seluruh proyek raksasa pemerintah, maka konsolidasi modal dilakukan. Ia juga melibatkan langsung militer sebagai pengeksekusi kebijakan di lini bisnis. Sentralisasi ini melahirkan ekonomi komando yang meniru struktur militer—hierarkis, terpusat, dan berorientasi pada kepatuhan.

Namun, otokrasi Prabowo dalam mengorganisasi ranah ekonomi—yang sentralistik dan militeristik ini—bukan semata karena ia berlatar belakang militer atau bekas menantu Soeharto. Ekonomi ekstraktif sendiri memerlukan infrastruktur koersif untuk menguasai ruang hidup dan menundukkan resistensi masyarakat agar dapat beroperasi tanpa rintangan. Itulah sebabnya, ekstraktivisme selalu bertendensi totaliter dalam mengontrol teritori. Aparatus represif, polisi dan militer, memainkan peran penting dalam mengendalikan stabilitas kawasan ekstraktif melalui strategi kontra-insurgensi. Strategi ini memiliki empat pola, yakni pengerahan aparat kekerasan, kriminalisasi warga, rekayasa konflik horizontal, dan manipulasi informasi publik. Selama setahun terakhir kita telah menyaksikan tingginya angka konflik antara rakyat dan negara, baik di pedesaan dengan masalah perampasan tanah maupun

Totalitarianisme ekonomi ekstraktif juga membutuhkan legitimasi kebijakan untuk memfasilitasi operasinya. Terdapat beberapa kebijakan yang berorientasi pada pengendalian total atas teritori dan penaklukan masyarakat. UU Minerba 2025 berfungsi sebagai simpul legal bagi politik teritorial ekonomi ekstraktif, karena ia meniadakan kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan tata ruang untuk izin pertambangan, sekaligus menjadi dasar bagi kriminalisasi warga bilamana “merintang aktivitas tambang”. Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan bervisi serupa—pelibatan militer langsung untuk melakukan operasi teritorial dengan menyita lahan dan memberikannya kepada PT Agrinas.

Satgas ini telah berhadap-hadapan dengan serikat buruh sawit dan mengintimidasi perlawanan mereka. Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) sudah berlangsung di Indonesia Timur, seperti Papua, untuk mengamankan proyek strategis nasional macam *food estate*. Rezim ini juga mengarahkan BTP untuk mengurus ketahanan pangan, sementara pada saat bersamaan PT. Agrinas (yang diisi para pensiunan jenderal) berencana mendirikan 20 sentra produksi beras di seluruh Indonesia. Puncaknya, revisi UU TNI dan RKUHAP akan tambah memperkuat infrastruktur kekerasan dan teknologi pasal pidana dalam meluncurkan ekspansi ekonomi ekstraktif dan menjinakkan tindakan politik warga negara.

Dengan demikian, ekstraktivisme dan politik komando saling bertalian. Politik komando menjamin bahwa keputusan ekonomi tidak bisa ditantang, sementara militer menjadi tulang punggung penegakan kepatuhan, sehingga membuat ekonomi ekstraktif beroperasi sebagai rezim totaliter: satu sistem yang menundukkan ruang, masyarakat, dan sumber daya alam di bawah logika tunggal pembangunan nasional yang dikendalikan dari pusat. Pelibatan militer secara terang-terangan juga mengembalikan mereka ke dalam bisnis—dalam kata lain, menjadi bagian elit oligarki, yang penguasaan atas senjata membikin mereka jadi kekuatan politik tak tertandingi.

Apa pelajaran dari setahun rezim Prabowo-Gibran?

Reformasi barangkali benar-benar telah berakhir. Rezim Prabowo adalah fase baru. Meskipun ada kesinambungan dengan periode Joko Widodo sebelumnya, ada patahan tegas. Prabowo melanjutkan politik tanpa oposisi, tetapi lebih sentralistik. Ia memimpin dengan gaya politik dan ekonomi komando. Prabowo merancang agar militer berdiri lebih kuat dengan menebalkan peran militer nyaris di seluruh sektor strategis, sekalipun harus memasuki ruang-ruang sipil.

Ia merangkul para loyalis dengan beragam latar belakang, mulai dari politikus, pengusaha, pensiunan jenderal, hingga keluarga. Prabowo tak ragu memberikan berbagai posisi strategis seperti jabatan menteri dan wakil menteri, komisaris, kepala badan, dan berbagai kebijakan publik lain, hanya untuk mengamankan sumber daya ekonomi strategis. Ia nampak menjadi sosok yang sangat mudah hati kepada para loyalis.

Namun, ia berubah menjadi sosok bertangan besi ketika menghadapi gelombang protes warga. Dengan mudah, rezim yang ia pimpin memutar narasi bahwa aksi politik warga -- yang menyuarakan protes dan kritik terhadap berbagai produk kebijakan -- sebagai aksi makar dan mengarah kepada tindak terorisme. Ia secara sembrono menyamakan aksi protes warga sebagai tindakan makar dan terorisme.

Bagai Bapak yang baik, ia tampil di publik meminta rakyat agar berdemokrasi dengan santun. Tetapi, ia bertindak buas dengan mengerahkan polisi untuk menangkap ribuan demonstran dan memenjarakan ratusan orang.

Dalam setahun terakhir, kita menyaksikan ambisi Prabowo untuk mengendalikan kekuasaan secara totalitarian—ini mengingatkan kita pada Orde Baru Soeharto. Dulu, kekuasaan Orde Baru Soeharto bertumpu pada ABG, akronim dari ABRI, Birokrasi dan Golkar. Sekarang Prabowo membangkitkan 'roh Orba' dalam versi baru: ABRI (TNI), Badan Gizi Nasional (BGN) dan Gerindra. TNI kembali aktif di ranah sipil, BGN dengan kekuatan anggaran dan dominasi pensiunan jenderal menjadi mesin birokrasi utama, sedangkan Gerindra menjelma poros politik dominan hingga ke daerah. Ditambah satu mesin pembiayaan baru bernama Danantara untuk mengongkosi ambisinya mengeruk habis sumber daya ekstraktif.

Ke depan akan semakin mengkhawatirkan. Perekonomian seakan salah urus: meninggalkan rakyat dalam kubangan krisis, tetapi menggemukkan para garong. Corak ekonomi komando dengan keterlibatan militer, efisiensi anggaran yang serampangan, hingga beratnya tekanan yang dihadapi kelas menengah bawah akan memuncak pada macetnya roda ekonomi. Ekonomi komando yang anti-kritik tidak bakal berakhir menjadi pertumbuhan 8% sebagaimana dijanjikan.

Pilihan memperluas industri ekstraktif atas nama hilirisasi sekilas akan memberikan rangsangan pertumbuhan, tetapi keuntungan tentu bukan untuk rakyat. Juga tidak ada jaminan bahwa pasar komoditas global akan bertahan dalam waktu panjang untuk menyerap hasil olahan mineral kritis atau produk turunan lainnya. Apalagi cadangan kandungan bumi itu punya batas. Malah yang akan terjadi adalah perburuan atas tanah di banyak wilayah republik beserta cerita-cerita penghancuran ekonomi pertanian subsistensi di pedesaan.

Sepuluh tahun terakhir industri nikel telah memberitahu kita apa yang salah: Investasi makin besar tetapi tidak berkualitas. Lingkungan hidup hancur, hidup kelas pekerja menurun, dan tidak ada ekonomi alternatif untuk menyelamatkan rakyat. Ekonomi komando Prabowo mengulang langgam itu dan akan membawa Indonesia semakin mundur. Sarjana yang menganggur tetap melonjak, kerja petani yang digantikan tentara makin luas, sisanya harus tersingkir ke gelanggang ojol atau sektor informal. Situasi ini semakin mencerminkan Indonesia yang berada di ujung tebing, menuju krisis.

Singkat kata, rezim Prabowo-Gibran sedang menuturkan kegagalan mereka di muka.

Apa pelajaran dari setahun Rezim Prabowo-Gibran?

Program strategis semakin bergerak ke pedesaan. Atas nama ketahanan pangan dan kemandirian energi, desa-desa menjadi sasaran program. Sebanyak 20 sentra produksi beras akan dibuka oleh Agrinas, sebanyak 100 Yonif Teritorial Pembangunan akan digerakkan untuk urusan pertanian, sebesar 100 gigawatt PLTS akan dibangun oleh Koperasi Merah Putih, dan daftar ini bisa bertambah panjang. Ada cerita perkebunan sawit dan pertambangan. Dalam setahun terakhir, tentara berhadapan-hadapan dengan buruh perkebunan sawit, dan 80 orang aktivis penolak tambang mengalami kriminalisasi.

Tiga dekade di bawah Orde Baru Soeharto, pedesaan mengalami penghancuran keswadayaan karena intervensi besar-besaran mencapai swasembada beras melalui revolusi hijau. Penduduk desa terlempar ke dalam *ekonomi mengambang* akibat penajaman ketimpangan agraria, sekaligus jadi *massa mengambang* lantaran dilarang berpolitik. Kini, Prabowo mengulang rumus lama. Mengirim tentara ke desa-desa adalah cerita penghancuran keswadayaan, pemberangusan otonomi politik warga.

Di perkotaan pun demikian. Kendati negara mengarah pada sentralisasi kekuasaan, ia tetap mempertahankan nafas neoliberal. Rezim fleksibilitas pasar tenaga kerja telah melemahkan kelas buruh secara sistematis. Di bawah sistem kerja yang semakin fleksibel—dengan kontrak jangka pendek, kerja paruh waktu, dan *outsourcing*—buruh kehilangan jaminan kepastian pendapatan dan perlindungan sosial. Sementara itu, sistem pengupahan berbasis inflasi membuat kenaikan upah tidak berarti di hadapan arus kenaikan harga barang-barang. Kombinasi keduanya menggerogoti kemampuan reproduksi sosial kelas buruh: kehidupan mereka makin rapuh, kualitas hidup menurun, dan ketergantungan pada utang serta pekerjaan informal meningkat. Dalam situasi ini, batas antara buruh formal dan informal kian kabur, dan menuntut bentuk pengorganisasian baru.

Ke ruang mana rezim ini bergerak, ke sanalah praksis pengorganisasian gerakan sosial harus diarahkan. Ke pedesaan (*yang terus dihabisi keswadayaannya*), dan ke di perkotaan (*yang kelas buruhnya terus dikirim ke dalam kerentanan*). Tentu saja tantangannya sangat berat. Infrastruktur kekerasan negara telah lebih siap "membayang-bayangi" kedaulatan rakyat biasa.

Namun, sampai kapan kita "*akan diperlakukan seperti batu, dibuang dipungut, atau dicabut seperti rumput, atau menganga, diisi apa saja menerima, tak bisa ambil bagian?*". Kata Wiji Thukul, "*Jika kau menghamba kepada ketakutan, kita memperpanjang barisan perbudakan.*"

#BERSIHKAN
INDONESIA